

**PEDAGOGI KEBERAGAMAN BERTITIK TOLAK DARI KAJIAN
ATAS GAGASAN RICHARD RORTY TENTANG
FILSAFAT-SEBAGAI-PERCAKAPAN**

DISERTASI

**Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Doktor dari
STF Filsafat Driyarkara**

oleh

LUCIANUS SUHARJANTO

NIM: 0820108519

Program Doktor



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA

2024

**PEDAGOGI KEBERAGAMAN BERTITIK TOLAK DARI KAJIAN
ATAS GAGASAN RICHARD RORTY TENTANG
FILSAFAT-SEBAGAI-PERCAKAPAN**

DISERTASI

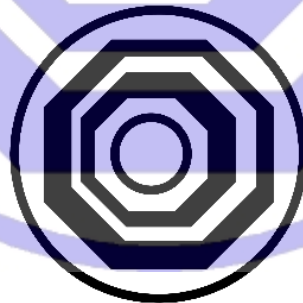
**Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Doktor dari
STF Filsafat Driyarkara**

oleh

LUCIANUS SUHARJANTO

NIM: 0820108519

Program Doktor



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA

2024

PENGESAHAN

**PEDAGOGI KEBERAGAMAN BERTITIK TOLAK DARI KAJIAN ATAS
GAGASAN RICHARD RORTY TENTANG FILSAFAT-SEBAGAI-PERCAKAPAN**

yang disusun oleh Lucianus Suharjanto

NIM: 0820108519

telah diuji pada tanggal 17 Februari 2024

Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. Dr. J. Sudarminta

Pembimbing Pendamping I



Dr. Karlina Supelli

Pembimbing Pendamping II



Prof. Dr. A. Sudiarja

Penguji I



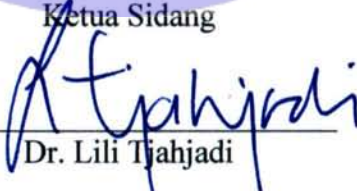
Dr. C.B. Mulyatno

Penguji II



Dr. H. Dwi Kristanto

Ketua Sidang



Dr. Lili Tjahjadi

Disertasi ini disahkan pada tanggal 2 Januari 2025

Direktur
Program Pascasarjana



Dr. Karlina Supelli

Ketua
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara



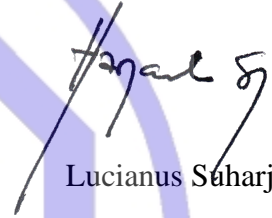
Dr. Lili Tjahjadi

PERNYATAAN

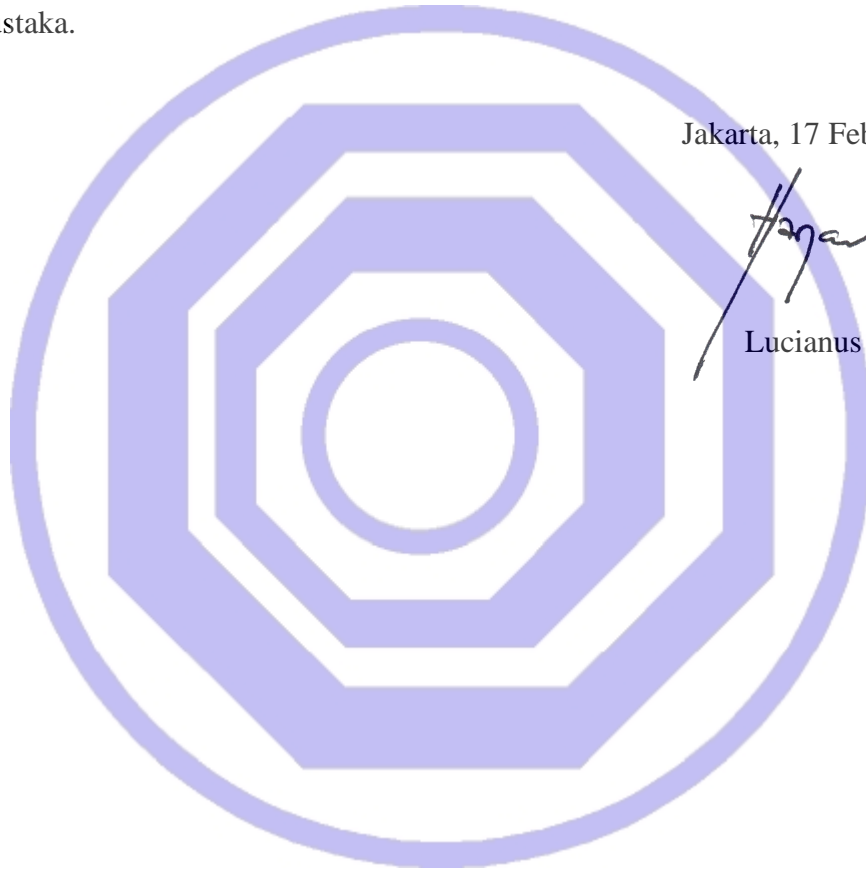
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam disertasi ini tidak terdapat teks

1. yang pernah diajukan sebagai karya tertulis, atau sebagai bagian dari karya tulis, yang pernah diajukan di suatu lembaga Pendidikan Tinggi untuk memperoleh gelar akademik, atau
2. yang sudah pernah dipublikasikan, atau
3. yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang dinyatakan secara tertulis sebagai sitasi dan dituliskan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Jakarta, 17 Februari 2024



Lucianus Saharjanto



PEDOMAN PENGGUNAAN DISERTASI

Disertasi Doktor yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, serta terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada pengarang dengan mengikuti aturan Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Referensi kepustakaan diperkenankan untuk dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan disertasi hanya dapat dilakukan dengan seizin penulis disertasi dan harus disertai dengan penyebutan sumbernya secara lengkap.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh disertasi harus seizin Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.



UCAPAN TERIMAKASIH

Saya haturkan terima kasih kepada

Prof. Dr. J. Sudarminta, Promotor

Dr. Karlina Supelli, Ko-Promotor I

Prof. Dr. A. Sudiarja, Ko-Promotor II

atas kebaikan yang terus-menerus diberikan dalam bentuk bimbingan, ujian, saran, kritik, dan perluasan wawasan untuk proposal, penelitian, laporan hasil penelitian, draft disertasi, dan naskah final disertasi ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. H. Dwi Kristanto dan Dr. C.B. Mulyatno, Anggota Tim Penguji, atas pembacaan naskah disertasi dan pertanyaan-pertanyaan afirmatif dan konstruktif yang diajukan. Terima kasih kepada Dr. Lili Tjahjadi atas sidang yang dipimpinnya sehingga percakapan atas disertasi mengenai pedagogi keberagaman ini menjadi wacana publik.

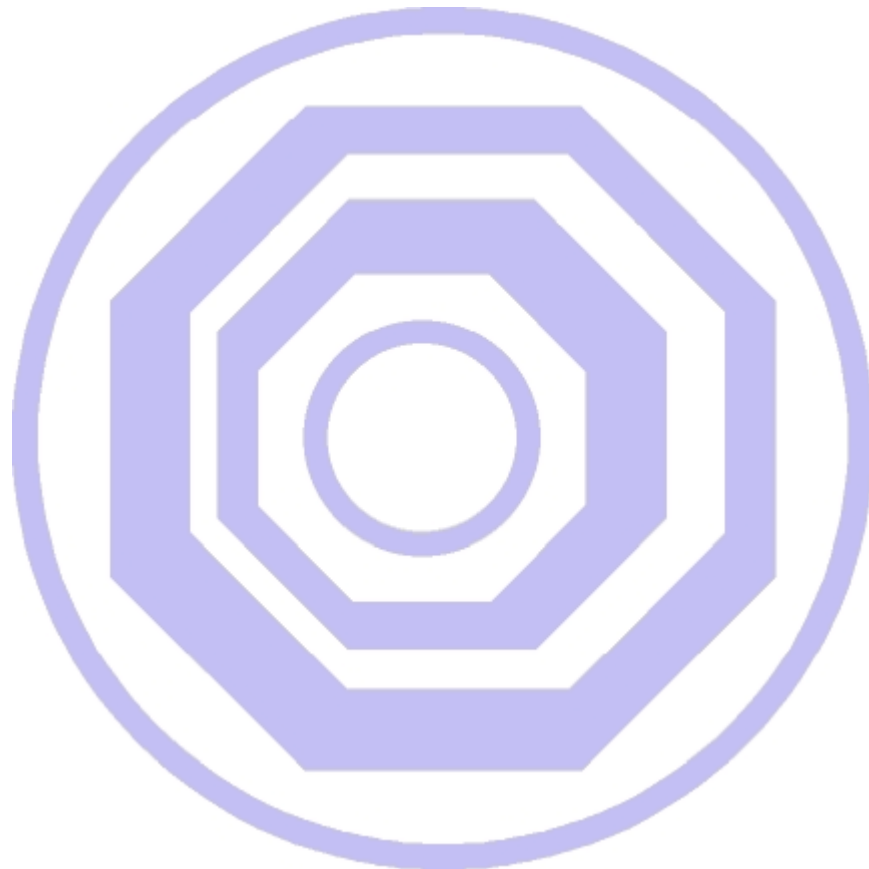
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen, sahabat Angkatan Program Doktor 2019, dan staf Sekretariat Program Pascasarjana STF Driyarkara, khususnya Ibu Therisia Asih Nawangwulan dan Ibu Retno Harjanti, atas pelayanan dan bantuannya.

Terima kasih saya sampaikan kepada Provinsial Provinsi Indonesia Serikat Jesus dan Staf, Pengurus dan Staf Yayasan Sanata Dharma, serta Rektor dan Staf Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan ijin dan beasiswa studi program doktor di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, dan kepada kolega di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan di Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Terima kasih saya sampaikan kepada semua saudara dan sahabat, atas perjumpaan dan percakapan yang inspiratif dan mengembangkan.

Pada pertengahan penyusunan proposal untuk penulisan disertasi ini, ibu saya Lusia Sumilah wafat pada jam 04.10 WIB tanggal 9 Maret 2020. Di antara kata-kata yang ia ucapkan menjelang wafatnya adalah “*sithik edhing.*” Kata-kata tersebut saya mengerti sebagai “berbagi ruang dan rasa.” Kelak saya mengerti bahwa berbagi ruang dan rasa

merupakan kebijaksanaan dalam masyarakat berkeragaman. Kemudian, ketika proposal disertasi siap diujikan pada jam 11.00 WIB tanggal 21 Desember 2020, kami menunggu Dr. B. Herry-Priyono di ruang ujian. Beliau tidak datang menguji; beliau wafat kira-kira satu jam sebelumnya. Bagi saya, mereka berdua adalah rekan percakapan selama penulisan disertasi. Percakapan dengan mereka tanpa gaya dan berlangsung tanpa persyaratan transitif ataupun intransitif. Saya mengerti: percakapan semacam itu sangat luas. Terimakasih kepada mereka.



ABSTRAK

[A] LUCIANUS SUHARJANTO (0820108519)

[B] PEDAGOGI KEBERAGAMAN BERTITIK TOLAK DARI KAJIAN ATAS GAGASAN RICHARD RORTY TENTANG FILSAFAT-SEBAGAI-PERCAKAPAN

[C] xviii + 308 hlm.; 2024; Daftar Pustaka

[D] Kata Kunci: filsafat-sebagai-percakapan, keberagaman, kontingensi, percakapan, rekontekstualisasi, rekonsiliasi

[E] Uraian Isi Abstrak

Disertasi ini merupakan upaya perumusan konsep pedagogi keberagaman dengan bertolak dari kajian atas gagasan Richard Rorty mengenai filsafat-sebagai-percakapan. Permasalahan yang dijawab melalui disertasi ini dirumuskan demikian: mengapa pedagogi keberagaman penting untuk dikembangkan di Indonesia dan mengapa gagasan Richard Rorty tentang filsafat-sebagai-percakapan yang bertujuan untuk memperjuangkan ruang kultural terbuka dapat dijadikan titik tolak yang memadai bagi upaya pengembangan tersebut; serta bagaimana pedagogi keberagaman dapat menyumbangkan penjelasan serta strategi pelaksanaan rumusan standar proses dan standar kompetensi dalam kurikulum Pendidikan Nasional Indonesia? Tiga anak pertanyaan diajukan untuk menjawab permasalahan tersebut. Mengapa gagasan Rorty tentang filsafat-sebagai-percakapan memadai untuk dipakai sebagai titik tolak pragmatis pengembangan pedagogi keberagaman? Apa konsep dari pedagogi keberagaman yang disusun berdasarkan kajian atas filsafat-sebagai-percakapan? Bagaimana konsep pedagogi keberagaman berkontribusi dalam pengembangan pendidikan berbasis keberagaman dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia? Melalui penelitian pustaka, tiga tesis dipertahankan dalam disertasi ini. Pertama, filsafat-sebagai-percakapan merupakan pragmatisme yang dikembangkan untuk edifikasi dan pluralitas estetis dalam rangka memperjuangkan ruang kultural terbuka. Oleh karenanya, filsafat-sebagai-percakapan memadai untuk menjadi titik tolak pragmatis penyusunan pedagogi keberagaman. Kedua, konsep pedagogi keberagaman yang disusun dengan bertitik tolak dari kajian atas filsafat-sebagai-percakapan mengarahkan capaian pendidikan pada edifikasi dengan mengedepankan pemelajaran dan pembelajaran berbasis perjumpaan yang dikelola dengan proses rekontekstualisasi, rekonsiliasi, dan komunikasi apresiatif. Ketiga, konsep pedagogi keberagaman berguna untuk mengembangkan konsep literasi, akulturasi, dan interaksi dalam rumusan sistem pendidikan nasional di Indonesia dengan konsep budaya sastra, penguasaan bahasa, dan pembelajaran susastra, dengan konsep interkulturasi, interaksi apresiatif, politik kebudayaan, dan pembangunan “rumah mental,” serta dengan konsep pembelajaran konversasional, pembelajaran reflektif, dan pembelajaran komunikatif. Disertasi ini memberi kebaruan dalam hal pemanfaatan kajian atas filsafat-sebagai-percakapan untuk penyusunan konsep pedagogi keberagaman. Disertasi ini juga menyumbangkan kebaruan dalam hal pengembangan konsep pendidikan dan konsep pembelajaran yang dirumuskan dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia dengan pendekatan kapabilitas masyarakat berkeagaman sebagaimana dirumuskan dalam konsep pedagogi keberagaman.

[F] Pustaka 240 (1948 – 2023)

[G] Prof. Dr. J. Sudarminta; Dr. Karlina Supelli; Prof. Dr. A. Sudiarja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	i
PERNYATAAN	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN DISERTASI	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
SENARAI ISTILAH	xvi
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Pemikiran	1
1.1.1 Perlunya pedagogi keberagaman	3
1.1.2 Tantangan konseptualisasi pedagogi keberagaman	5
1.1.3 Angin kegembiraan dalam gagasan Rorty tentang filsafat-sebagai-percakapan	9
1.1.4 Mengembangkan pedagogi keberagaman dari filsafat-sebagai-percakapan	13
1.1.4.1 Konsep kunci untuk perumusan pedagogi keberagaman	17
1.1.4.2 Menuju perumusan pedagogi keberagaman	21
1.2 Rumusan Permasalahan	23
1.2.1 Mengapa gagasan Rorty tentang filsafat-sebagai-percakapan memadai untuk dipakai sebagai titik tolak pragmatis pengembangan pedagogi keberagaman?	24
1.2.2 Apa konsep dari pedagogi keberagaman yang disusun berdasarkan kajian atas filsafat-sebagai-percakapan?	25
1.2.3 Bagaimana konsep pedagogi keberagaman berkontribusi dalam pengembangan pendidikan berbasis keberagaman dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia?	26
1.3 Tesis Disertasi	27
1.3.1 Rumusan Tesis	27
1.3.2 Penjelasan Tesis	28
1.4 Argumentasi Kebaruan	32
1.5 Tujuan Disertasi	35
1.6 Metode Penulisan Disertasi	36
1.7 Kerangka Disertasi	37
1.8 Rangkuman	40
Bab II Filsafat-sebagai-Percakapan sebagai Titik Tolak Pragmatis Pedagogi Keberagaman	42
2.1 Pendahuluan	42
2.2 Filsafat-sebagai-Percakapan dalam Pandangan Rorty mengenai Filsafat	42

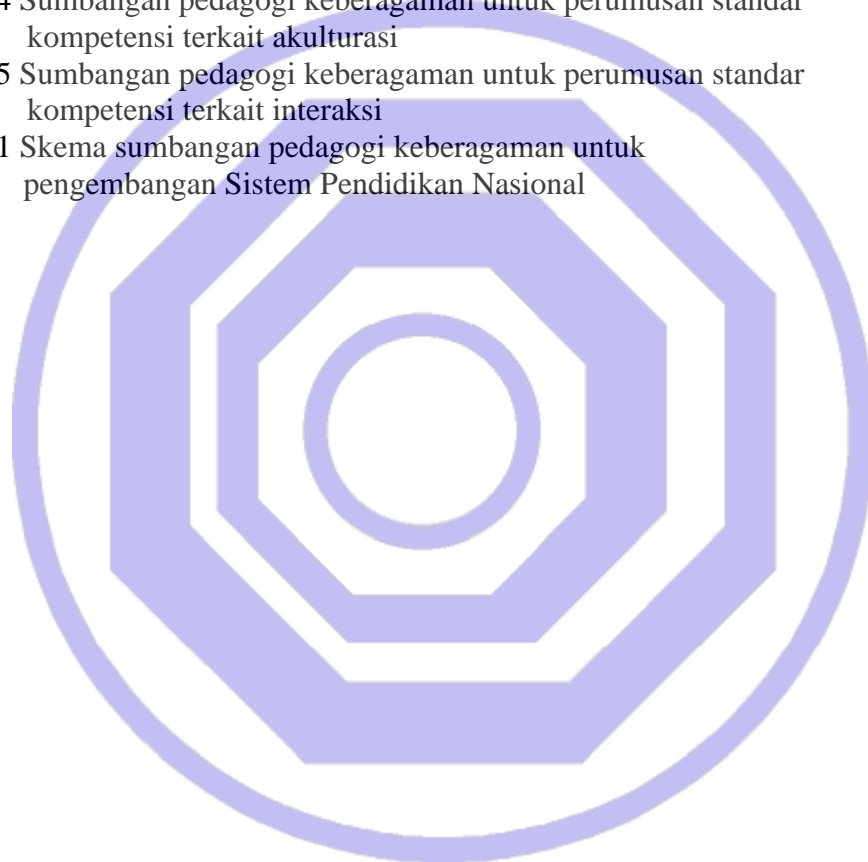
2.2.1 Konsep filsafat-sebagai-percakapan dirumuskan dari tulisan-tulisan Rorty	43
2.2.2 Struktur minimal konsep filsafat-sebagai-percakapan	50
2.2.2.1 Suatu pragmatisme	51
2.2.2.1.1 Pemisahan privat dan publik	53
2.2.2.1.2 Temporalitas	55
2.2.2.1.3 Kontingensi	57
2.2.2.2 Dilakukan dalam budaya sastra (<i>literary culture</i>)	58
2.2.2.2.1 Edifikasi	60
2.2.2.2.2 Susastra dan kritik sastra	62
2.2.2.2.2.1 Novel	64
2.2.2.2.2.2 Puisi	67
2.2.2.2.2.3 Kritik sastra dan percakapan	69
2.2.2.2.3 Demokrasi dalam budaya sastra	73
2.2.2.3 Terlaksananya fungsi sosial	76
2.2.2.3.1 Harapan sosial	77
2.2.2.3.2 Peran para intelektual dalam budaya sastra	79
2.3 Filsafat-sebagai-Percakapan dan Keberagaman	79
2.3.1 Filsafat-sebagai-percakapan dalam filsafat Amerika Klasik	80
2.3.1.1 Pluralisme estetis Amerika	81
2.3.2 Filsafat-sebagai-percakapan sebagai pluralisme estetis	85
2.3.2.1 Kosakata	85
2.3.2.2 Redeskripsi dan politik kebudayaan	86
2.3.2.3 Komunikasi: percakapan bukan untuk penggabungan melainkan perluasan	87
2.4 Rangkuman	90
Bab III Ruang Kultural Terbuka	93
3.1 Pendahuluan	93
3.2 Ruang Kultural Terbuka dan Arahnya	94
3.2.1 Konsep mengenai ruang kultural terbuka dalam filsafat-sebagai-percakapan	94
3.2.1.1 Jaman baru: humanis dan imajinatif	96
3.2.1.2 Perubahan kebudayaan melalui perubahan kosakata (nominalisme)	99
3.2.1.3 Sekularisasi yang matang	101
3.2.1.4 Profil tokoh kebudayaan tersajak	101
3.2.2 Bentuk kultural kebudayaan tersajak: bahasa, diri, dan masyarakat	103
3.2.2.1 Kultur mengenai bahasa	104
3.2.2.2 Kultur mengenai diri manusia	107
3.2.2.3 Kultur mengenai masyarakat	110
3.2.3 Arah perjuangan penciptaan ruang kultural terbuka	114
3.3 Sifat Dinamis Kebudayaan Terbuka	117
3.3.1 Plural, berjalan bersama, dan merdeka (bukan konvergensi)	119
3.3.2 Peran imajinasi	120
3.3.3 Peran metafora dan narasi	121
3.3.4 Dinamika penyajakan dan utopia	124

3.4 Proses-proses yang Dipilih dalam Ruang Kultural Terbuka	127
3.4.1 Rekontekstualisasi dalam ruang bahasa	128
3.4.2 Rekonsiliasi dalam ruang privat	130
3.4.3 Komunikasi apresiatif dalam ruang publik	131
3.5 Rangkuman	136
Bab IV Pedagogi Keberagaman: Rekontekstualisasi, Rekonsiliasi, Apresiasi	138
4.1 Pendahuluan	138
4.2 Mengembangkan Pedagogi Keberagaman dari Kajian atas Filsafat-sebagai-Percakapan	138
4.2.1 Bertitik tolak dari gagasan mengenai kegiatan intelektual	140
4.2.2 Pokok-pokok dari pragmatisme dan humanisme, serta filsafat-sebagai-percakapan	143
4.3 Capaian Pedagogi Keberagaman	149
4.4 Pedagogi Keberagaman	155
4.4.1 Aktivitas intelektual dalam pedagogi keberagaman	157
4.4.2 Peran pembelajar	164
4.4.3 Perangkat pedagogi keberagaman	171
4.4.3.1 Kemampuan manusiawi untuk pembaruan: sikap menerima kontingensi dan imajinasi	171
4.4.3.2 Teknologi pembelajaran: percakapan dan penentuan relevansi	175
4.4.4 Proses pedagogis pedagogi keberagaman	187
4.4.4.1 Rekontekstualisasi berbasis perjumpaan	188
4.4.4.1.1 Pembelajaran konversasional	188
4.4.4.1.1.1 Pentingnya percakapan	190
4.4.4.1.1.2 Apresiasi	191
4.4.4.1.1.3 Redeskripsi melalui kesadaran individual dan kelompok	192
4.4.4.1.1.4 Politik kebudayaan	193
4.4.4.1.2 Pembelajaran sastra	195
4.4.4.1.2.1 Pendidikan perasaan	198
4.4.4.1.2.2 Perjumpaan perspektif	202
4.4.4.1.3 Pembelajaran reflektif	205
4.4.4.2 Rekonsiliasi	208
4.4.4.3 Komunikasi Apresiatif	214
4.5 Rangkuman	219
Bab V Sumbangan Konsep Pedagogi Keberagaman bagi Pengembangan Pendidikan di Indonesia	222
5.1 Pendahuluan	222
5.2 Konteks Sosio-historis Diskursus Keberagaman Masyarakat Indonesia	224
5.2.1 Pendekatan politik dalam multikulturalisme di Indonesia	224
5.2.2 Pendekatan ekonomi multikultural dalam industri turisme etnik di Indonesia	225

5.2.3 Fenomena rekonsiliasi interkultural dalam tradisi keagamaan dan literasi	227
5.2.3.1 Tradisi keagamaan iluminasionisme	229
5.2.3.2 Tradisi intelektual dan literasi	233
5.3 Posisi Pedagogi keberagaman dalam Diskursus Keberagaman di Indonesia	238
5.4 Pedagogi Keberagaman dan Kebijakan Pendidikan dalam Kurikulum Nasional	245
5.4.1 Standar proses	245
5.4.2 Literasi dan bahasa ibu	251
5.4.3 Akulturasi melalui perjumpaan dan percakapan	257
5.4.4 Interaksi sebagai komunikasi reflektif, apresiatif, dan kreatif	262
5.4.5 Politik kebudayaan melalui bahasa ibu	266
5.5 Rekonsiliasi Interkultural melalui Pendidikan	268
5.6 Pedagogi Keberagaman, Kreativitas, dan Cita-cita Kesejahteraan Indonesia	272
5.7 Rangkuman	279
Bab VI Kesimpulan	281
6.1 Pendahuluan	281
6.2 Rangkuman Umum	281
6.2.1 Pokok-pokok mengenai pluralisme estetik	282
6.2.2 Pokok-pokok mengenai ruang kultural terbuka	285
6.2.3 Pokok-pokok mengenai pedagogi keberagaman	286
6.2.4 Pokok-pokok mengenai pedagogi keberagaman untuk pendidikan keberagaman di Indonesia	288
6.3 Kesimpulan-kesimpulan	290
6.4 Catatan Kritis dan Saran	299
6.5 Penutup	307
Daftar Pustaka	309

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Skema perumusan pedagogi keberagaman bertitik tolak dari filsafat-sebagai-percakapan	140
Tabel 4.2 Aktivitas intelektual dalam pedagogi keberagaman	161
Tabel 5.1 Pedagogi keberagaman dalam diskursus keberagaman di Indonesia	239
	246
Tabel 5.2 Sumbangan pedagogi keberagaman untuk perumusan standar proses sebagai sistem sosial di lingkup sekolah	
Tabel 5.3 Sumbangan pedagogi keberagaman untuk perumusan standar kompetensi terkait literasi	252
Tabel 5.4 Sumbangan pedagogi keberagaman untuk perumusan standar kompetensi terkait akulturasi	259
Tabel 5.5 Sumbangan pedagogi keberagaman untuk perumusan standar kompetensi terkait interaksi	263
Table 6.1 Skema sumbangan pedagogi keberagaman untuk pengembangan Sistem Pendidikan Nasional	292

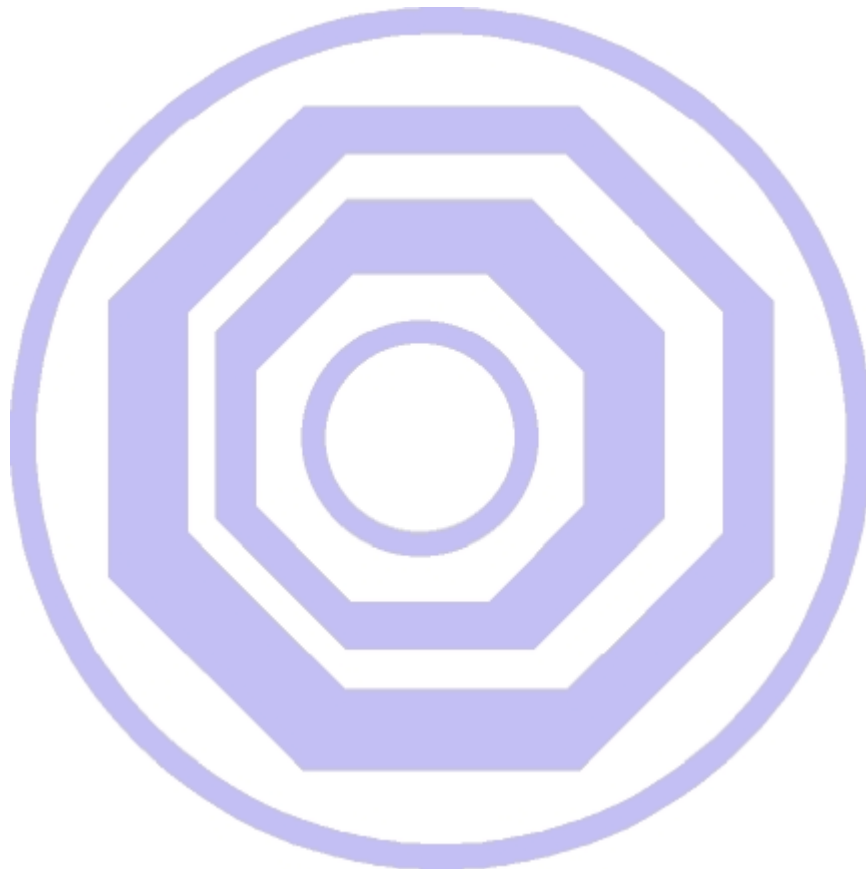


DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Nama	Keterangan	Pemakaian pertama kali pada halaman
KBBI	<i>Kamus Besar Bahasa Indonesia</i>	Departemen Pendidikan Nasional, 2008; Edisi Keempat; Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama	xvii
Tulisan Richard Rorty dalam bentuk buku dan artikel			
AOC	<i>Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth Century America</i>	1998; Cambridge: Harvard University Press.	43
CIS	<i>Contingency, Irony, and Solidarity</i>	1989; Cambridge: Cambridge University Press.	10
CP	<i>Consequences of Pragmatism: (Essays: 1972-1980)</i>	1982; Minneapolis: University of Minnesota Press.	19
EHO	<i>Essays on Heidegger and Others</i>	1991; Philosophical Papers 2. Cambridge University Press.	25
ESI	“Education as Socialization and Individualization”	1999; Dalam <i>Philosophy and Social Hope</i> [PSH] (hlm. 114-126). New York: Penguin Books.	18
ET	<i>An Ethics for Today: Finding Common Ground between Philosophy and Religion</i>	2008; New York: Columbia University Press.	37
FMR	“Freud and Moral Reflection”	1991; Dalam R. Rorty, <i>Essays on Heidegger and Others</i> [EHO] (hlm. 143-163), Philosophical Papers 2. Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan pada tahun 1991)	146
HKD	“Heidegger, Kundera, and Dickens”	1991; Dalam R. Rorty, <i>Essays on Heidegger and Others</i> [EHO], (hlm. 66–82). Philosophical Papers 2. Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan pada tahun 1991)	25
IV	“The Inspirational Value of Great Works of Literature”	1998; Dalam R. Rorty, <i>Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth-Century America</i> [AOC], (hlm. 125-140). Cambridge,	128

		Mass.: Harvard University Press.	
NITT	“Nineteenth-Century Idealism and Twentieth-Century Textualism”	1981; <i>The Monist</i> , 64(2), 155-174.	
ORT	<i>Objectivity, Relativism, and Truth</i>	1991; Philosophical Papers 1. New York: Cambridge University Press.	37
PCP	<i>Philosophy as Cultural Politics</i>	2007; Philosophical Papers 4. New York: Cambridge University Press.	14
PDP	“The Priority of Democracy to Philosophy”	1988; Dalam M. D. Peterson & R. C. Vaughan (Eds.), <i>The Virginia Statute for Religious Freedom: Its Evolution and Consequences in American History</i> . Cambridge Studies in Religion and American Public Life. Cambridge.	6
PKW	“Philosophy as a Kind of Writing: An essay on Derrida”	1978; <i>New Literary History</i> , 10(1), 141-160.	70
PMN	<i>Philosophy and the Mirror of Nature</i>	1979; New Jersey: Princeton University Press.	10
PPTC	“Professionalized Philosophy and Transcendentalist Culture”	1976; <i>The Georgia Review</i> , 30(4), 757-769.	62
PRI	“Pragmatism, Relativism, and Irrationalism”	1980; <i>Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association</i> , 53(6), 719-738. https://doi.org/10.2307/3131427	52
PSH	<i>Philosophy and Social Hope</i>	1999; New York: Penguin Books.	18
PTG	“Philosophy as a Transitional Genre”	2004; Dalam R. J. Bernstein, S. Benhabib, & N. Fraser (Eds.), <i>Pragmatism, Critique, Judgment: Essays for Richard J. Bernstein</i> (hlm. 3-28). Cambridge, MA: MIT Press.	51
TEP	“Comments on Castoriadis's ‘The End of Philosophy’”	1989; <i>Salmagundi</i> , 82/83, 24-30.	14
TF	“Truth and Freedom: A Reply to Thomas McCarthy”	1990; <i>Critical Inquiry</i> , 16(3), 633-643.	37
TP	<i>Truth and Progress</i>	1998; Philosophical Papers 3. Cambridge: Cambridge University Press.	146

TPP	“The Pragmatist's Progress”	1992; Dalam S. Collini (Ed.), <i>Interpretation and Overinterpretation</i> (hlm. 89- 108). Cambridge: Cambridge University Press.	56
TWO	“Trotsky and the Wild Orchids”	1992; Dalam R. Rorty, <i>Philosophy and Social Hope</i> [PSH] (1998, hlm. 3-20). New York: Penguin Books.	55
UA	“The Unpatriotic Academy”	1994; <i>New York Times</i> , 13 Februari 1994, Bagian 4, 15.	37



SENARAI ISTILAH

Belajar: berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman

Membelajarkan: menjadikan belajar, menyampaikan bahan pembelajaran

Mengajar (tidak dipakai dalam disertasi ini): memberi pelajaran, melatih, memarahi (memukul, menghukum, dan sebagainya) supaya jera

Pembelajar: orang yang membelajarkan; pengajar

Pembelajaran: proses, cara, dan perbuatan menjadikan belajar; dilakukan oleh seorang pembelajar

Pemelajar: orang yang mempelajari; murid, siswa

Pemelajaran: proses, cara, dan perbuatan mempelajari; dilakukan oleh seorang pemelajar

Edifikasi: merupakan istilah yang dipakai oleh Richard Rorty untuk pendidikan (*education*) dan perkembangan (*Bildung*). Istilah edifikasi dalam filsafat-sebagai-percakapan Rorty merujuk pada proses kebudayaan dan perkembangan diri. Istilah edifikasi dikaitkan dekat dengan pandangan Rorty bahwa filsafat lebih merupakan alat percakapan dan perkembangan diri daripada merupakan jalan untuk mencari kebenaran.

Filsafat-sebagai-percakapan: merupakan istilah untuk filsafat yang berorientasi pada hermeneutika yang dikembangkan oleh Richard Rorty agar berfungsi edifikasi. Agar filsafat berfungsi edifikatif, filsafat perlu memecah konvensi, meninggalkan gambaran tradisional mengenai diri manusia yang memiliki esensi, yang pikirannya mencerminkan alam semesta, yang bahasanya merupakan representasi dari realitas yang diungkapkannya. Untuk mengusahakan itu semua, filsafat-sebagai-percakapan dilandasi pandangan bahwa tidak ada satu pun dalil yang begitu layak sehingga bisa mengharuskan orang untuk berpikir mengenai dirinya dengan cara tertentu daripada dengan cara lain. Aktivitas filsafat edifikatif disebut percakapan. Aktivitas percakapan dalam filsafat digambarkan sebagai puisi dan kesusastraan dibandingkan dengan matematika atau sains.

Kebudayaan tersajak: cara berbudi dan berdaya dengan nilai estetis sebagai standar, bersifat terbuka dan merdeka, dituntun dengan imajinasi dan utopia; merupakan terjemahan atas istilah *poeticized culture*

Budaya sastra: budaya literasi dan budaya kesusastraan; gaya berakal dan berbudi dengan tulisan (literatur) dan kritik sastra sebagai model aktivitas intelektualnya; merupakan terjemahan atas istilah *literary culture*.

Budaya sastra mengedepankan ketersediaan akses kepesertaan (inklusi), kepercayaan pada proses naratif, imajinatif, dan konversasi, keterbukaan ruang

bagi pemajanan perbedaan perspektif dan kemungkinan baru; mempraktikkan pemikiran kritis (*abnormal*), mempraktikkan perlakuan secara tidak biasa atas fakta sejarah, mengerjakan edifikasi, dan mempraktikkan percakapan yang memajukan hidup batin atau mendukung kematangan mental, dengan cipta diri sebagai orientasinya.

Plural estetik: sikap yang memberi ruang terbuka terhadap perbedaan dan alternatif, yang dikembangkan dengan pembangunan tradisi intelektual yang mendayagunakan perasaan, imajinasi, dan utopia.

Pluralisme estetik: merupakan pandangan filsafat mengenai keberagaman pengalaman, nilai, dan pemikiran mengenai estetika. Dalam pluralisme estetik, dipahami bahwa individu dan budaya yang berbeda memiliki pilihan dan interpretasi estetika yang bervariasi, bahkan kadang saling bertentangan. Pluralisme estetik bukan monopoli tradisi filsafat Amerika. Namun demikian, filsafat Amerika klasik memiliki corak pandangan pluralisme estetik. Filsafat-sebagai-percakapan Rorty dikategorikan dalam pluralisme estetik karena penolakan terhadap fondasionalisme, penekanan pada kontingensi kebudayaan, fokus pada bahasa, ironisme, dan orientasi pragmatismenya. Sebagai pluralisme estetik, filsafat-sebagai-percakapan mendorong penghargaan terhadap keberagaman pengalaman estetika dan pengakuan bahwa nilai-nilai estetika bersifat kontingensi tergantung pada konteks di mana mereka muncul.

Poetik: sifat puitis, yakni memberi kosakata dan cara berbicara baru yang lebih menarik dan lebih menjelaskan, menyebabkan terjadinya rasa baru yang menggemberikan, dan menguatkan kemampuan bersolidaritas

Ruang kultural terbuka: tradisi intelektual yang berkembang dalam pluralitas, yang bekerja dengan memakai kekuatan imajinasi, metafora dan narasi, dan penyajakan, serta berdinamika dengan dituntun oleh utopia.

Susastra (menurut KBBI): karya sastra yang isi dan bentuknya sangat serius, berupa ungkapan pengalaman jiwa manusia yang ditimba dari kehidupan kemudian direka dan disusun dengan bahasa yang indah sebagai sarannya sehingga mencapai syarat estetika yang tinggi, misalnya novel, drama, puisi.

Komunikasi apresiatif: interaksi verbal dengan fokus pada aspirasi dan determinasi diri dari interlokutor

Apresiasi: perbuatan mengakui hal terbaik (yang memberi kesehatan, vitalitas, dan kecemerlangan) yang ada pada orang atau lingkungan

Percakapan

- dalam “**filsafat-sebagai-percakapan**”: memperlihatkan peran filsafat sebagai suatu suara dalam percakapan umat manusia; memperlihatkan cara berfilsafat dengan tidak mempergunakan dalil, tetapi dengan mengedepankan kemauan untuk melakukan pembicaraan, kesediaan mendengarkan pihak lain, dan menimbang konsekuensi keputusan dan

tindakan dirinya bagi pihak lain (CP, 172), serta mempertahankan keseimbangan antara standar dan keterbukaan untuk berubah (CP, 218).

- **konversasional**: tidak mutlak, bisa salah, bisa berubah
- dalam “**percakapan tiga putaran**”: aktivitas pembicaraan dengan orang lain secara terencana
- dalam “**melakukan percakapan**”: aktivitas pembicaraan dengan orang lain secara spontan
- dalam “**membaca percakapan**”: teks berbentuk pembicaraan beberapa tokoh

Pedagogi keberagaman: pendekatan terhadap pembelajaran dan pembelajaran yang disusun dengan bertitik tolak dari kajian atas filsafat-sebagai-percakapan Richard Rorty dan dengan memanfaatkan kapabilitas masyarakat berkeagaman

Kapabilitas masyarakat berkeagaman meliputi kemampuan komunalitasnya, kemampuannya untuk menjalani komitmen kenegaraan, dan kemampuannya untuk berkebangsaan secara nasional.

Pedagogi keberagaman memiliki ciri antara lain:

- pembelajaran dilakukan dengan strategi pembelajaran konversasional berbasis pertemuan, pembelajaran sastra, dan pembelajaran reflektif (memeriksa asumsi-asumsi, nilai, dan keyakinan sendiri)
- dengan memakai teknologi percakapan, apresiasi, *literary criticism*, dan politik kebudayaan melalui perubahan bahasa, pendidikan rasa (afeksi), dan pertemuan perspektif
- berparadigma pragmatis (apropriasi kesadaran akan kontingensi), estetis (imajinatif), solider (menjangkau kosakata pihak lain).

Rekonsiliasi: istilah rekonsiliasi dipakai untuk menyebut aktivitas rekontekstualisasi dan redeskripsi atas dua atau lebih perspektif yang tidak sejalan sehingga didapatkan suatu perspektif yang lebih luas, liberal, relevan, dan edifikatif.

Proses rekonsiliasi meliputi pemahaman, refleksi, deliberasi, negosiasi, kompromi, dan perumusan visi perbuatan; pembelajaran rekonsiliatif dipahami sebagai penciptaan kondisi-kondisi untuk keberlangsungan percakapan yang menjawab kebutuhan akan keadilan, kegembiraan, dan ketercukupan.

Pembelajaran rekonsiliatif bukan dimaksudkan sebagai upaya penemuan visi tunggal atau nilai universal, melainkan pembangunan sikap untuk ada bersama dan berjalan bersama dalam keberagaman.

BAB I

Pendahuluan

Bagian pertama bab pendahuluan disertasi ini berisi latar belakang perumusan pedagogi keberagaman dengan bertitik tolak dari kajian atas gagasan Richard Rorty tentang filsafat-sebagai-percakapan. Berdasarkan latar belakang itu, dirumuskanlah satu permasalahan utama, yang dijabarkan dalam tiga anak pertanyaan. Hasil penelitian atas permasalahan tersebut diringkaskan pada bab pendahuluan ini dalam bentuk tesis disertasi. Dirumuskan secara ringkas juga kebaruan yang terdapat dalam disertasi ini. Pada akhir bab pendahuluan, disampaikan hal-hal teknis mengenai disertasi, yaitu tujuan, metode, dan kerangka disertasi.

1.1 Latar Belakang Pemikiran

Penulisan disertasi ini merupakan usaha penyusunan konsep pedagogi keberagaman dengan memanfaatkan gagasan-gagasan Richard Rorty¹ mengenai filsafat-sebagai-percakapan. Penulis memahami pedagogi keberagaman sebagai pendekatan terhadap proses pembelajaran dan pembelajaran² di lingkup pendidikan *formal* dan *non-formal* dengan memanfaatkan konsep rekontekstualisasi, rekonsiliasi, dan komunikasi apresiatif yang dikembangkan dari kajian atas filsafat-sebagai-percakapan. Konsep-konsep tersebut dimanfaatkan untuk membantu pemelajar dan pembelajar mengalami pendidikan yang memiliki model relasi, koordinasi, dan institusi yang tidak menghina dan tidak kejam

¹ Richard M. Rorty (4 Oktober 1931- 8 Juni 2007) adalah penggagas filsafat-sebagai-percakapan. Ia seorang filsuf dari Amerika yang menggeluti terutama sejarah filsafat dan filsafat analitik kontemporer. Rorty berkarir sebagai profesor filsafat di Princeton University, Kenan, profesor humaniora di University of Virginia, dan profesor sastra komparatif di Stanford University. Karyanya yang paling terkenal antara lain *Philosophy and the Mirror of Nature* (1979), *Consequences of Pragmatism* (1982), and *Contingency, Irony, and Solidarity* (1989).

² Dalam disertasi ini, kata “**pemelajaran**” dan “**pembelajaran**” dipakai karena kedua kata ini lebih bisa memperlihatkan dimensi interaksi dan pengembangan otonomi yang disasar dalam pedagogi keberagaman. Kata “pemelajaran” memperlihatkan dimensi keputusan aktif individu untuk melakukan kegiatan belajar. Kata “pembelajaran” memperlihatkan bahwa peran utama seorang pembelajar adalah memfasilitasi orang lain untuk belajar dengan bahan atau kegiatan. Dengan alasan yang sama, dipakai kata “**pemelajar**” dan “**pembelajar**” daripada kata “pelajar” dan “pengajar.” Kedua kata ini juga lebih mudah dipakai untuk menyebut tidak hanya siswa atau mahasiswa di sekolah formal, tetapi juga setiap orang yang belajar dan setiap orang yang membelajarkan suatu bahan dan latihan di tempat-tempat *non-formal*. Kata “pelajaran” dan “pengajaran” akan jarang sekali dipakai di dalam disertasi ini. Kata kerja “**belajar**” masih akan dipakai untuk mendefinisikan usaha memperoleh ilmu atau ketrampilan, sedangkan kata “mengajar” akan diganti dengan kata “**membelajarkan**.”

terhadap keberagaman. Melalui pedagogi keberagaman, kegiatan pendidikan diarahkan pada terjadinya perluasan diri yang mendukung keberfungsian individu dalam mengusahakan solidaritas sosial dan penciptaan ruang kultural yang terbuka.

Konsep pedagogi keberagaman ini disusun berdasarkan keyakinan bahwa keberagaman adalah kekayaan kebudayaan manusia. Di lingkungan pendidikan di Indonesia, keberagaman dipandang sebagai faktor penting untuk menentukan kebijakan pedagogis dan administratif. Dikatakan demikian karena pertimbangan mengenai keberagaman selalu ada dalam setiap rumusan kurikulum nasional, baik sebagai konteks, standar kompetensi, proses, tujuan, maupun isi pendidikan. Bentuknya berupa rumusan-rumusan seperti prinsip kesamaan derajat setiap manusia dalam pelaksanaan pendidikan,³ rumusan norma terkait suku, agama, ras, dan golongan yang harus diikuti di lingkungan pendidikan,⁴ atau rumusan standar kompetensi, proses, atau isi dari pengelolaan kelas.⁵ Meskipun tekanan interpretasi mengenai apa yang dimaksud dengan keberagaman itu berbeda di setiap periode kurikulum, inti dari persoalan keberagaman yang mau ditanggapi melalui pendidikan adalah terwujudnya toleransi atas perbedaan dan kesetaraan akses atas pendidikan. Sekolah-sekolah ingin mengembangkan ruang yang ideal untuk suasana belajar dan proses pembelajaran, yakni ruang yang terbuka bagi keberagaman. Sekolah juga menginginkan civitasnya berkembang dalam watak dan ketrampilan yang dituntut oleh keberagaman. Sasaran lebih luas dari standar-standar mengenai keberagaman di lingkungan sekolah di Indonesia ini adalah masyarakat yang menghidupi nilai-nilai Pancasila. Di antaranya adalah tidak mengganggu keperluan dan aktivitas berketuhanan setiap orang, tidak melakukan diskriminasi karena alasan gender, umur, ekonomi, etnik, dan ciri fisik, perlindungan yang sama oleh negara, dan

³ Misalnya Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan tahun 1946 yang dimuat dalam *Pewarta PPK* No. 2 Tahun 1951 tentang Pedoman Dasar-dasar Pengajaran. Tema keberagaman muncul dalam bentuk keyakinan mengenai kesamaan derajat setiap manusia, sehingga hubungan antarmanusia didasarkan pada sikap “hormat-menghormati, berdasar atas rasa keadilan, dengan berpegang teguh atas harga diri sendiri.”

⁴ Tekanan pada identitas nasional (bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, bendera nasional yaitu Merah Putih, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, semboyan nasional yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*) sebagai sumber norma perilaku hidup individual, berbangsa, dan bernegara diimplementasikan dalam kurikulum Nasional sejak 1965 sampai 1994 karena alasan keberagaman.

⁵ Seperti sangat nampak dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

ketersediaan ruang partisipasi dalam koordinasi sosial dan penentuan kebijakan bersama. Semua itu demi kesejahteraan jasmani dan rohani setiap manusia. Pemerintah dan institusi pendidikan di Indonesia tahu bahwa keberagaman biologis, geografis, kebudayaan, dan perspektif masyarakat Indonesia merupakan tantangan khas yang perlu direfleksikan dan dikelola dalam keputusan-keputusan dan kebijakannya dari waktu ke waktu. Dirumuskan sebagai pertanyaan, bagaimana kebijaksanaan masyarakat berkeagaman bisa bermanfaat untuk kesuksesan pendidikan di Indonesia? Bagaimana kekayaan keberagaman masyarakat Indonesia ini bisa menjadi kekayaan sebuah pedagogi?

1.1.1 Perlunya pedagogi keberagaman

Usaha-usaha ke arah pengembangan ruang kultural yang terbuka dan watak yang relevan bagi keberagaman telah ditempuh melalui kebijakan pendidikan dari waktu ke waktu di Indonesia. Contoh kebijakan pendidikan paling kontemporer yang terkait dengan keberagaman adalah pertukaran pelajar antarperguruan tinggi dalam negeri dengan sistem transfer kredit yang dicanangkan dalam kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Alasan kebijakan itu adalah profil lulusan perguruan tinggi yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, yaitu bahwa pemelajar dididik untuk memiliki sikap “menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan.”⁶

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengadopsi kebijakan mengenai keberagaman karena kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia merupakan turunan dari keputusan-keputusan legislatif dan administratif kenegaraan untuk mencapai tujuan negara. Kepentingan negara seperti dirumuskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah bahwa pendidikan nasional berfungsi “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” dan bertujuan “mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

⁶ Lih. “Rumusan Sikap” dalam Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional.

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”⁷ Dirumuskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, fungsi pendidikan nasional adalah “mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (Pasal 1). Dalam rumusan tersebut jelas dinyatakan bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan oleh negara untuk melayani kepentingan negara, yaitu “membentuk watak serta peradaban bangsa” agar pelajar menjadi “warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab” (Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003). Unsur yang baru dalam dokumen terkemudian adalah “kekuatan...pengendalian diri” dan “ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (PP No. 57 Tahun 2021) yang menyiratkan upaya negara menanggapi tantangan-tantangan terkait keberagaman masyarakat Indonesia.

Kepentingan adanya pedagogi keberagaman di lingkungan pendidikan di Indonesia dianggap mendesak, terutama untuk menjawab fenomena maraknya praktik intoleransi, bentuk-bentuk dominasi dan kekerasan berbasis perbedaan dan identitas yang terjadi di lingkungan sekolah. Lebih luas lagi, pedagogi keberagaman diperlukan untuk terciptanya keadaban publik (*public civility*) berbasis keberagaman. Keadaban publik yang dicita-citakan Indonesia adalah kesediaan negara, pasar, dan masyarakat warga memberikan ruang terbuka untuk berpikir, berimajinasi, dan beraktivitas. Cita-cita ini dirumuskan secara integratif dengan cita-cita di bidang lain kehidupan di dalam lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental menurut Inpres No. 12 Tahun 2016, yakni Program Gerakan Indonesia Melayani, Program Gerakan Indonesia Bersih, Program Gerakan Indonesia Tertib, Program Gerakan Indonesia Mandiri, dan Program Gerakan Indonesia Bersatu. Dalam Program Gerakan Indonesia Bersatu, ditekankan peningkatan perilaku, kebijakan, penegakan hukum, dan penyelenggaraan pendidikan yang mendukung kesatuan dan persatuan. Secara khusus ditekankan peningkatan perilaku keagamaan,

⁷ Dirumuskan dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; juga dalam Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

pendidikan agama, dan peran lembaga agama dalam mempromosikan toleransi, kerukunan, budi pekerti, dan kesetiakawanan sosial. Implisit dalam program revolusi mental ini adalah keprihatinan terhadap ruang publik yang tidak toleran, tidak rukun, dan tidak setia kawan karena alasan agama. Secara negatif, pedagogi keberagaman merupakan upaya menanggapi permasalahan intoleransi berbasis agama tersebut. Secara positif, pedagogi keberagaman merupakan upaya pengembangan potensi dan kekayaan yang ada dalam keberagaman masyarakat Nusantara.

1.1.2 Tantangan konseptualisasi pedagogi keberagaman

Meskipun kebijakan pendidikan mengenai hidup berkeagaman dianggap penting untuk diimplementasikan dalam sistem pendidikan di Indonesia dan merupakan bagian dari kepentingan negara untuk mendidik warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, ada beberapa persoalan yang pada hemat penulis belum mendapatkan solusi, baik di tataran teoretis, pedagogis, kurikuler, maupun struktural. Persoalan pertama adalah sistem dan struktur yang mendukung pendidikan berbasis keberagaman. Persoalan ini pernah dipikirkan oleh Ki Hadjar Dewantara (*Pendidikan*, 1961a) ketika beliau menyatakan keberatan atas “*sistem sekolah umum*” (sekolah negeri). Ki Hadjar berpandangan bahwa sistem tersebut akan “*mendjauhkan anak-anak dari alam keluarganya dan alam rakjatnja*” (Ki Hadjar, *Pendidikan*, 70). Dilihat dari perspektif Ki Hadjar mengenai pendidikan sistem trisentra, yaitu sistem pendidikan yang mengintegrasikan peran keluarga, sekolah, dan gerakan kepemudaan, cita-cita pendidikan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab bisa tercapai kalau pendidikan intelektual dan pemberian pengetahuan di lingkungan sekolah diimbangi pendidikan budi pekerti dan perilaku sosial di keluarga serta pendidikan watak di lingkungan kepemudaan (Ki Hadjar, *Pendidikan*, 74). Asumsi dalam sistem pendidikan trisentra ini adalah bahwa pembentukan “watak serta peradaban bangsa” -seperti kemudian ditulis dalam UU No. 20 Tahun 2003 sebagai tujuan pendidikan- dilakukan di luar sekolah atau, seandainya bisa dilakukan di lingkungan sekolah, tetap mensyaratkan keterlibatan institusi di luar sekolah. Sementara, pendidikan di sekolah menitikberatkan perannya pada perolehan pengetahuan dan pengembangan intelektualitas. Dari perspektif ini, suatu pedagogi keberagaman yang dikembangkan di sekolah membutuhkan kondisi berupa

sistem dan struktur kolaborasi antara sekolah dengan lingkungan sosial dan politik, yang mendukung baik perkembangan watak maupun peradaban bangsa yang tidak hanya toleran tetapi juga memanfaatkan potensi dan kekayaan yang ada dalam keberagaman.

Persoalan kedua berupa pertanyaan teoretis dan filosofis mengenai hubungan antara pengembangan individu-individu di sekolah dan demokrasi dalam suatu entitas politik, yakni negara. Harapan bahwa sekolah menghasilkan warga negara yang demokratis memuat persoalan teoretis kalau dipahami bahwa sekolah lebih berkepentingan dengan pengembangan diri warga negara sebagai individu, sementara demokrasi adalah perihal koordinasi sosial suatu entitas politik yang dijalankan dengan hukum dan kekuasaan. Diungkapkan dengan pandangan Rorty dalam “The Priority of Democracy to Philosophy” (1988, selanjutnya PDP), demokrasi tidak menentukan (*to support*) dan tidak ditentukan (*to presuppose*) oleh pandangan mengenai siapa dan menjadi apa manusia (*theory of the self*) (PDP, 269). Artinya, dalam perspektif Rorty, pengembangan individu dan pengembangan demokrasi adalah dua ranah yang ada bersama tetapi tidak saling menentukan. Pengembangan diri menjadi individu yang demokratis memanfaatkan teori-teori mengenai manusia, sementara politik yang demokratis adalah persoalan koordinasi sosial yang keberhasilannya tidak mengandaikan teori-teori pengembangan diri. Di dalam kepercayaan pada kesetangkupan (*commensuration*) kedua ranah itulah letak persoalan teoretis dan filosofis ketika keberagaman dikelola melalui suatu pedagogi. Hal yang sama terjadi dengan pendidikan karakter dan pendidikan moral yang dicanangkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Dengan pencanangan tersebut, secara eksplisit diungkapkan kepercayaan bahwa tindakan pendidikan yang dilakukan di sekolah berkorelasi langsung dengan penyelesaian masalah sosial dan politik. Misalnya, demi mengatasi masalah korupsi, sekolah-sekolah harus mengadakan pendidikan antikorupsi.⁸ Demi mengatasi masalah intoleransi dan radikalisme agama, sekolah-sekolah perlu menggalakkan lagi pendidikan wawasan kebangsaan.⁹ Eksekunya antara lain penekanan

⁸ Lihat Pasal 13 (c) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi: “Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut: (c) menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan, ...”

⁹ Upaya peningkatan wawasan kebangsaan melalui pendidikan tersirat melalui rumusan tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menjelaskan tujuan tersebut, Depdiknas (2009: 30) mendeskripsikan wawasan kebangsaan dalam tiga konsep, yaitu paham kebangsaan, rasa kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Peraturan

mengenai pentingnya pembelajaran agama, matakuliah moral, dan aplikasi atribut-atribut ideologis di sekolah. Pedagogi keberagaman yang secara langsung akan berurusan dengan produk ideasional mengenai keberagaman dan produk tindakan etis dan estetis yang inspirasinya diperoleh dari kebijaksanaan hidup masyarakat berkeberagaman perlu mendiskusikan persoalan teoretis dan filosofis model-model kesetangkupan semacam itu.

Persoalan ketiga berkaitan dengan persoalan kedua di atas, yaitu pertanyaan mengenai proses dan perangkat pedagogi keberagaman. Di Indonesia, tema keberagaman mulai didiskusikan sebagai persoalan ketika bangsa-bangsa di Nusantara membentuk entitas politik. Berbeda dari persoalan keberagaman di Kanada atau Amerika yang terjadi karena imigrasi (Taylor, "The Politics of Recognition," 52), persoalan keberagaman di Indonesia dilatarbelakangi oleh keinginan bangsa-bangsa di Nusantara untuk bersatu sebagai suatu negara dalam rangka melawan kolonisasi. Bangsa-bangsa tersebut semula merupakan kesatuan etnik atau kerajaan yang memiliki kekhasan fisik, bahasa, religiositas, dan ikatan kekerabatan serta ikatan sosial dalam suatu kesatuan wilayah. Di kemudian hari, ada ikatan lain lintas suku, misalnya denominasi dan agama, kepentingan ekonomi, serta aliran pemikiran politik. Terbentuknya entitas politik negara Indonesia tidak menghilangkan identitas kesukuan serta identitas religius, ekonomi, dan politik tersebut. Partikularitas yang semula tidak menimbulkan persoalan di internal bangsa-bangsa atau di internal komunitas berubah menjadi faktor konstitutif keberagaman ketika entitas politik negara Indonesia mensyaratkan kesatuan dan persatuan. Ketentuan mengenai

Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan mendefinisikan wawasan kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Instansi pendidikan mengimplementasikan pengembangan wawasan kebangsaan ini dalam Program Pendidikan Karakter (PPK), misalnya dalam matapembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berdasarkan operasional Kurikulum 2003. PPK dimaksudkan untuk mengembangkan karakter pemelajar dan membekali pemelajar menghadapi kondisi degradasi moral, etika, dan budi pekerti melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetis), olah pikir (literasi) dan olah raga (kinestetik) dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga dan masyarakat (Sukiman, 2017). PPK sebagai poros perbaikan pendidikan nasional disesuaikan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dicanangkan oleh pemerintah (Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)). Dalam Inpres tersebut, satuan pendidikan diminta menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah dan bebas kekerasan, bersih dan sehat, serta memberikan pendidikan agama yang membelajarkan keberagaman, toleransi, dan budi pekerti. PPK dilakukan dengan mengusahakan keseimbangan antara kecakapan intelektual (kognitif) dan kecakapan emosional-spiritual (sikap dan nilai), dengan prioritas pada pengembangan nilai religiositas, kemandirian, integritas, nasionalisme, dan gotong royong (Inpres 12 Tahun 2016).

persatuan itu dikukuhkan dalam Pancasila, UUD 1945, dan dokumen perundangan lainnya. Artinya, bangsa-bangsa dan jenis-jenis kesatuan lainnya sepakat untuk tunduk pada undang-undang dan hukum yang sama demi mencapai tujuan bersama. Persoalan terkait keberagaman, bahkan konflik, muncul ketika harus ditentukan implikasi dari konsep, otoritas, cara, personalia, anggaran, dan legalitas untuk mencapai tujuan negara. Suatu pedagogi keberagaman -yang dirumuskan dengan konteks Nusantara dan sejarah pembentukannya menjadi Indonesia- perlu menimbang dengan teliti bahwa keberagaman di Indonesia bertali erat dengan latar belakang historis keragaman tersebut. Dalam konteks kebutuhan untuk berkoordinasi sosial sebagai bangsa dan negara kesatuan itulah negara hadir sebagai agen penyelenggara, termasuk penyelenggara pendidikan.

Kepentingan pendidikan keberagaman adalah pengembangan individu-individu yang terus memperluas diri dan membuka ruang untuk percakapan mengenai koordinasi sosial yang bersolidaritas. Kepentingan negara dengan penyelenggaraan pendidikan adalah pencapaian tujuan-tujuan negara. Dalam konteks kepentingan negara mendidik warganya sesuai tujuan negara, pendidikan dianggap sebagai faktor penting pembentuk masyarakat. Pendidikan memiliki tanggung jawab sosial untuk membentuk warganegara yang terlibat, toleran, demokratis, dan cerdas. Pendidikan juga dilihat sebagai alat untuk memperkuat dan melindungi nilai-nilai nasional, sehingga kurikulum pendidikan dirancang agar mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap sejarah, budaya, dan identitas nasional. Negara juga memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik. Pendidikan dijadikan sandaran untuk mencegah konflik sosial dan membangun kohesi nasional. Konsekuensi dari kepentingan-kepentingan negara ini antara lain adalah perbenturan dengan eksistensi pendidikan sebagai institusi yang perlu mandiri dan bebas dari intervensi politik atau ideologi pemerintah.

Konteks sosial politik pendidikan di Indonesia yang semacam itu memberikan koridor mengenai bentuk perjuangan yang melatarbelakangi penyusunan pedagogi keberagaman. Dalam konteks keseimbangan antara kepentingan negara dan pendidikan sebagai institusi eksistensial manusia, pedagogi keberagaman perlu menyumbangkan pemikiran mengenai kebebasan akademik, keragaman dan pluralitas, kewajaran dan kesetaraan, pencegahan

politisasi pendidikan, serta inovasi-inovasi di luar koridor kepentingan kenegaraan. Apa pendekatan dan proses yang perlu dibangun agar pedagogi keberagaman tidak terjebak dalam solusi-solusi setangkup, misalnya bahwa tujuan pendidikan dan penentuan kebijakan kurikulum didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang didefinisikan oleh pemerintah. Apa gagasan baru mengenai pendidikan dikembangkan dari visi pedagogi keberagaman? Apa perangkat pedagogi keberagaman?

1.1.3 Angin kegembiraan dalam gagasan Rorty tentang filsafat-sebagai-percakapan

Saya tertarik untuk memakai kajian atas gagasan Rorty tentang filsafat-sebagai-percakapan sebagai titik tolak perumusan pedagogi keberagaman karena suasana gembira yang diciptakan oleh gagasan-gagasan Rorty tersebut. Sangat baik bahwa pedagogi keberagaman yang mau dipakai untuk mengelola kekayaan keberagaman masyarakat Indonesia itu dirumuskan dari sesuatu yang menggembirakan. Rasa gembira penulis ketika membaca gagasan-gagasan Rorty itu datang dari rasa longgar karena kesadaran bahwa ikatan-ikatan yang berasal dari aturan main bahasa, dari definisi mengenai identitas diri, dan dari ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat ternyata merupakan kontingensi. Doktrin kontingensi yang mewarnai pemikiran-pemikiran Rorty mengenai filsafat, mengenai pengetahuan, atau mengenai politik tidak hanya memberi suasana, tetapi juga membawa konsekuensi pada logika dan keputusan mengenai bentuk filsafat yang lebih bisa berperan dan memberikan sumbangan terbaiknya bagi manusia. Pemikiran Rorty mengenai agama, mengenai politik, juga mengenai pendidikan, diwarnai secara kental oleh kesadaran akan kontingensi tersebut. Sasaran Rorty dengan apropriasi atas kontingensi tersebut adalah terciptanya keterbukaan dan kebebasan ketika orang beragama, berpolitik, atau belajar.

Berproses secara intelektual dengan gagasan-gagasan Rorty mengenai filsafat-sebagai-percakapan dan komentar-komentar tentangnya, meneliti perasaan-perasaan yang terjadi di sepanjang upaya mempercakapkan gagasan Rorty itu dengan tema keberagaman, dan berimajinasi mengenai hal-hal yang mungkin dari yang digagas oleh Rorty, harapan saya tumbuh bahwa ada jalan untuk mengangkat keberagaman sebagai kebijaksanaan

pedagogis yang akan menjadi guru yang menuntun budi, afeksi, imajinasi, dan tindakan-tindakan manusia dalam kebudayaan dan masyarakatnya.

Filsafat-sebagai-percakapan merupakan proyek utama pemikiran Rorty pada tahun 1980-an mengenai suatu tradisi filsafat yang selalu terbaru (*redescribing*)¹⁰ yang dipromosikan untuk mengembangkan peradaban yang terbuka (*open*), serta mendidik dan bermanfaat (*edifying*).¹¹ Pemikiran mengenai filsafat-sebagai-percakapan diulas oleh Rorty dalam *Philosophy and the Mirror of Nature* (1979, selanjutnya PMN), dan dikembangkan atau dideskripsikan lebih lanjut dalam tulisan-tulisan sesudahnya. Di dalam PMN, gagasan mengenai filsafat-sebagai-percakapan ditempatkan dalam kritik terapeutik Rorty terhadap model filsafat fondasional dan representasional (PMN, xiii). Rorty menengarai dalam kajian historisnya atas filsafat bahwa model berfilsafat dengan mencari dasar dan norma universal (fondasional) serta model berfilsafat dengan membangun metode yang menghasilkan pengetahuan yang secara akurat mencerminkan realitas (representasional) sudah terlihat dalam tulisan-tulisan filosofis sejak jaman Plato. Pada kurun modern model tersebut masih terlihat, misalnya dalam tulisan-tulisan jaman Rene Descartes di abad ke-16, pada jaman John Locke di abad ke-17, pada jaman Immanuel Kant di abad ke-18. Pada filsafat analitik di abad ke-20 pun kecenderungan tersebut masih terlihat. Rorty dengan terang menyebut pemikiran filsafat yang berorientasi fondasional dan representasional beberapa kurun tersebut sebagai filsafat yang berorientasi pada epistemologi.¹² Filsafat gaya epistemologis ini berfokus pada pembangunan fondasi rasional¹³ dan tujuannya adalah menjamin bahwa pengetahuan manusia sungguh secara

¹⁰ Istilah ‘redesripsi’ dipakai oleh Rorty untuk merujuk pada metode berfilsafat, metode pengembangan diri, dan metode perubahan sosial dengan deskripsi ulang atas banyak hal dengan banyak cara dan kosakata baru yang lebih bermanfaat (Rorty, *Contingency, Irony, Solidarity* [CIS], 1989, 8).

¹¹ Istilah ‘edifikasi’ (*edification*) dipakai oleh Rorty untuk mempertajam istilah ‘pendidikan’ (*education*) dan istilah ‘*Bildung*’ (bahasa Jerman), yaitu dengan menekankan aspek pemerdekaan diri dari diskursus normatif yang dominan melalui aktivitas hermeneutika dan melalui sosialisasi dengan paradigma lain, dengan tujuan memperoleh kosakata yang lebih berguna dalam menghadapi dunia (PMN, 360).

¹² Dalam PMN, Rorty memakai istilah epistemologi dalam dua pengertian. Pertama, epistemologi dimengerti sebagai “teori pengetahuan. Kedua, epistemologi dimengerti sebagai “kesetangkupan” (*commensurability*). Istilah “kesetangkupan” dijelaskan oleh Rorty sesuai rumusan Thomas Kuhn, yakni “bisa diatur dengan seperangkat ukuran yang dipandang bisa menghasilkan kesepakatan rasional atas suatu pernyataan yang bertentangan (PMN, 316). James Tartaglia (2014) memberi penjelasan bahwa kalau Rorty berbicara mengenai “kematian epistemologi,” ia merujuk pada pengertian pertama. Kalau Rorty berbicara mengenai epistemologi sebagai yang bertentangan dengan hermeneutika, Rorty sedang merujuk pada pengertian kedua (Tartaglia, “Rorty’s Thesis,” 181).

¹³ Diasumsikan bahwa fondasi rasional yang bisa disepakati bersama itu ada. Pada abad ke-17, fondasi tersebut dilihat sebagai metode yang benar untuk mencapai kebenaran. Pada filsafat analitik, fondasi

akurat mencerminkan kenyataan. Akibatnya, filsafat dipandang sebagai suatu disiplin ilmu dan berperan mengukur sah dan benarnya produk pengetahuan dari bidang lain seperti sains, agama, matematika, atau sastra (PMN, 212). Menurut Rorty, orientasi pada epistemologi membuat filsafat tertutup dan perannya sebagai disiplin membuatnya konfrontatif.

Meskipun filsafat-sebagai-percakapan yang disampaikan oleh Rorty dalam PMN merupakan kritik historis mengenai orientasi filsafat secara luas, fokus dari kajian oleh Rorty adalah filsafat modern dan filsafat analitik. Pandangan Rorty mengenai filsafat-sebagai-percakapan dibangun dengan menggabungkan kritik Wilfrid Sellars atas konsep “*givenness*” (PMN, xiii, 10) dan kritik Willard van Orman Quine atas konsep “*necessity*” (PMN, 10) dalam teori pengetahuan (PMN, 171). Rorty merujuk kepada kedua tokoh ini karena mereka berpandangan bahwa pengetahuan merupakan hasil justifikasi manusia. Dalam pemikiran Rorty mengenai pengetahuan, justifikasi bukanlah mengenai akurat tidaknya kontak antara gagasan atau kata-kata dengan objeknya, melainkan merupakan praktik percakapan (PMN, 170) yang sangat dipengaruhi oleh reaksi dan relasi manusia dengan lingkungannya. Dalam perspektif ini, suatu pengetahuan dipahami sebagai praktik sosial dan kultural, yang berfungsi bukan sebagai cermin (*a mirror of*) realitas, melainkan sebagai perangkat kerja untuk menanggapi (*a tool to cope with*) masalah yang dihadapi manusia. Usaha memperoleh pengetahuan yang dipahami secara demikian tidak berorientasi pada penemuan akurasi representasi, tidak juga pada penemuan fondasi universal yang akan dijadikan alasan pemahaman bersama.¹⁴ Mempercakapkan pemikiran Sellars dan Quine, serta mengadopsi pandangan Donald Davidson mengenai teori koherensi internal dalam suatu keyakinan, Rorty mengembangkan pandangan holistik mengenai pengetahuan dan bahasa yang ia sebut sebagai behaviorisme epistemologis.¹⁵ Dengan pandangan antifondasional mengenai pengetahuan dan bahasa,

tersebut terletak dalam bahasa yang sedemikian universal sehingga mampu memberi ruang terhadap segala makna yang mungkin (PMN, 316-7).

¹⁴ "Akhirnya, seperti dikatakan para penganut pragmatisme, yang terpenting adalah kepedulian kepada sesama manusia dalam berjuang menghadapi kegelapan, bukan keinginan kita untuk membetulkannya" (CIS, 166). Lihat juga "Solidarity or Objectivity?" dalam John Rajchman dan Cornel West, eds., *Post-Analytic Philosophy* (New York: Columbia University Press, 1985), 15.

¹⁵ Pandangan holistik mengenai pengetahuan ini diberi nama oleh Rorty sebagai “behaviorisme epistemologis.” Dalam behaviorisme epistemologis, justifikasi selalu merujuk pada apa yang sudah diterima secara sosial, yakni keyakinan dan bahasa. Justifikasi tidak dirujuk pada suatu fondasi atau ontologi tertentu.

Rorty membuat kritik historis atas filsafat dan mengembangkan konsep filsafat-sebagai-percakapan. Dalam pandangannya, filsafat-sebagai-percakapan tidak terorientasi pada pencarian suatu kepastian (PMN, 171),¹⁶ tetapi menjalankan peran edifikatifnya dengan berorientasi pada hermeneutika.

Sebagai tradisi pemikiran filosofis, filsafat-sebagai-percakapan didisposisikan dan didefinisikan sebagai suatu suara saja dalam percakapan umat manusia. Meninggalkan model fondasionalisme dan representasionalisme, filsafat-sebagai-percakapan dibangun oleh Rorty dari perspektif kesadaran bahwa bahasa, identitas, dan masyarakat merupakan kontingensi. Karena bahasa merupakan kontingensi, karena definisi-definisi untuk mawadahi konsep mengenai identitas merupakan kontingensi, dan karena aneka jenis relasi dan institusi yang dibuat manusia merupakan kontingensi, semua perspektif dan keyakinan yang terkait dengan hal-hal itu merupakan kontingensi juga. Dipahami dari doktrin kontingensi itu, peran masing-masing perspektif dan keyakinan, termasuk filsafat, adalah suatu suara saja, yang ada bersama (*co-exist*) dan berjalan bersama (*co-being*) perspektif dan keyakinan lain. Filsafat sebagai suatu suara selalu terbuka pada rekontekstualisasi dan redeskripsi, dengan dituntun oleh imajinasi manusia. Filsafat berkontribusi terhadap peradaban bukan dengan mengukur validitas produk keilmuan lain, melainkan dengan cara menggalakkan penggunaan kosakata yang memperluas rentangan deskripsi diri individu dan peradaban. Tujuan filsafat bukan mencari akurasi suatu representasi, misalnya penemuan kosakata yang memiliki kebenaran objektif dalam mencerminkan esensi (PMN, 372), melainkan mengusahakan kosakata yang memungkinkan manusia lebih bebas, lebih gembira, dan lebih lentur atau toleran dalam menghadapi keadaan (*to cope with the world*), terutama keberagaman. Untuk tujuan ini, menurut Rorty filsafat perlu lebih berorientasi pada hermeneutika (PMN, 315) dan berperan pragmatis.

Membuat ulasan mengenai filsafat-sebagai-percakapan, Rorty memperlihatkan bahwa ada yang keliru di balik seluruh kerangka perdebatan antara objektivisme dan relativisme dalam filsafat. Kekeliruannya terletak pada paradigma fondasionalisme, termasuk dalam

¹⁶ Quine dan Sellars sendiri menurut Rorty tidak mengembangkan konsepsi baru mengenai filsafat (PMN, 171). Dalam kajian Rorty, mereka justru mengusulkan sains sebagai pengganti filsafat. Rorty mempertanyakan mengapa yang diusulkan adalah ilmu alam dan bukan seni, politik, atau agama.

kecenderungan membuat filsafat sekonstruktif mungkin. Diungkapkan oleh Bernstein, Rorty memperlihatkan bahwa fondasionalisme membuat gagasan-gagasan filsafat yang semula membebaskan berujung pada kungkungan sikap intelektual yang kaku (Bernstein, "Philosophy," 775). Oleh karena itu, dengan filsafat-sebagai-percakapan, Rorty mengajak siapa saja untuk memperluas kemerdekaan diri dan kemerdekaan filsafat dengan terus-menerus mencermati obsesi dan kompulsi terhadap tatanan dan batasan yang selalu menjadi godaan kuat dalam pengembangan diri maupun dalam berfilsafat. Pertanyaannya, bagaimana refleksi filosofis Rorty ini bisa didekatkan dengan persoalan pendidikan? Lebih khusus lagi, bagaimana filsafat-sebagai-percakapan akan dipakai sebagai titik tolak pragmatis untuk mengembangkan pedagogi keberagaman?

1.1.4 Mengembangkan pedagogi keberagaman dari filsafat-sebagai-percakapan

Beberapa pemikir telah memanfaatkan pemikiran-pemikiran Rorty mengenai pragmatisme, redeskripsi, demokrasi (Rohrer, "Self-Creation," 2000), ironi (Striano, "Notes," 2020), edifikasi (Allan Janik, "On Edification," 1989), serta solidaritas -tema-tema yang implisit maupun eksplisit terdapat dalam gagasan filsafat-sebagai-percakapan-untuk mengembangkan gagasan mengenai pendidikan yang demokratis (Shook, "Pragmatism, Pluralism," 2010), pendidikan kebangsaan (Kwak, "Stanley Cavell's Moral Perfectionist," 2004), atau pendidikan yang mengembangkan solidaritas (Rohrer, "Self-Creation"). Rohrer mengajukan gagasan bahwa pendidikan yang diarahkan pada profil ironi liberal perlu memberi keseimbangan pada pemahaman mengenai kebebasan individu dan cipta diri dengan moralitas yang membuka ruang untuk perkembangan demokrasi multikultural dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk itu, diperlukan pendidikan moral, yang menekankan komitmen. Alasan Rohrer adalah bahwa privat dan publik memang tidak dijumpai pada tingkat teori, tetapi pada tingkat eksistensial keduanya terhubung oleh komitmen terhadap kehidupan yang demokratis (Rohrer, "Self-Creation," 61).

René Arcilla ("Edification, Conversation, and Narrative," 1990) mengembangkan rumusan filsafat pendidikan gaya Rorty (*Rortyan philosophy of education*) dengan berfokus pada edifikasi pemelajar dan edifikasi pembelajar melalui proses percakapan.

Menurut Arcilla, percakapan atas teks naratif, baik teks yang didapat dari refleksi personal maupun teks yang memanfaatkan bahasa lirik dramatik dalam narasi seperti novel, lebih efektif untuk tujuan edifikasi (Arcilla, “Edification, Conversation, and Narrative,” 38-9). Ulasan oleh Arcilla ini merupakan pengembangan atas harapan Rorty mengenai kebudayaan yang lebih bernafaskan narasi daripada teori. Memakai kata-kata Hegel, Rorty menyebut suasana intelektual seperti yang diulas oleh Arcilla ini sebagai “peralihan dari berteori ke bercerita” (Rorty, “Comments on Castoriadis’s ‘The End of Philosophy’” [selanjutnya TEP], 1989, 26). Menurut Rorty, syarat terjadinya peralihan tersebut adalah redeskripsi atau penggantian atas gagasan esensialisme bahwa manusia memiliki kodrat (TEP, 26). Rorty mendeskripsikan perubahan dari pandangan esensialisme mengenai manusia ini sebagai “penyembuhan” transisional atau evolutif dari agama melalui filsafat ke susastra dan budaya sastra.¹⁷

Dengan juga merefleksikan konsep edifikasi, Robert Reich (“The Paradoxes,” 1996) memanfaatkan deskripsi oleh Rorty mengenai manusia sebagai makhluk non-esensial. Manusia itu berkontingensi dan merupakan hasil rajutan keinginan dan keyakinan yang tidak berpola (*centerless network of beliefs and desires*) (Reich, “The Paradoxes,” 344). Menurut Reich, dalam pandangan bahwa manusia itu non-esensial, edifikasi merupakan proyek sepanjang hidup untuk membentuk diri (*self-formation*) dan menciptakan diri kembali (*self-recreation*). Lingkungan publik ada untuk menjamin kelangsungan proyek edifikasi perorangan tersebut, yaitu dengan menyediakan suasana yang aman, kekayaan yang cukup, dan kebebasan (CIS, 84-85; Reich, “The Paradoxes,” 345).

Pemikir lainnya mengintegrasikan pokok-pokok pemikiran neopragmatisme Rorty terutama anti-esensialisme dan anti-objektivisme untuk membangun pandangan-

¹⁷ Evolusi dari agama melalui filsafat ke kesusastraan dan budaya sastra itu dipandang oleh Rorty sebagai inovasi kebudayaan “dari relasi non-kognitif pada pribadi non-manusia melalui relasi kognitif dengan proposisi-proposisi menuju relasi non-kognitif kepada sesama manusia yang dijumpai dengan artefak buatan manusia seperti buku dan bangunan, lukisan dan lagu. Jenis kebudayaan semacam ini mengoreksi keyakinan yang dibangun oleh agama dan filsafat bahwa ‘penyembuhan’ atau ‘penebusan’ harus terjadi melalui relasi seseorang dengan sesuatu yang bukan buatan manusia.” Teks asli: (*...redemption [...] in a non-cognitive relation to a non-human person [through] a cognitive relation to propositions [to] non-cognitive relations to other human beings, relations mediated by human artifacts such as books and buildings, paintings and songs. This sort of culture drops a presupposition common to religion and philosophy – that redemption must come from one’s relation to something that is not just one more human creation*) (Rorty, *Philosophy as Cultural Politics* [selanjutnya PCP], 1980, 93).

pandangan tentang pendidikan kritis dan multikultur. Stanley Fish (1999), pemikir dari Amerika di bidang teori-teori kritis (*literary theory*), mengeksplorasi lebih lanjut pemikiran anti-objektivisme Rorty dengan menekankan peran bahasa dalam pembentukan makna dan implikasi pendekatan konversasional terhadap pemahaman atas teks. Pokok-pokok tersebut dijabarkan dalam *The Trouble with Principle* (1999), di dalamnya Fish memakai pandangan-pandangan Rorty sebagai titik tolak untuk refleksi-refleksinya, yakni bahwa komunitas adalah penafsir (*interpretive communities*) dan bahwa keberagaman perspektif amat penting dalam pembacaan dan penafsiran karya sastra. Sementara William Pinar, seorang ahli dalam teori pendidikan, mengintegrasikan gagasan Rorty mengenai ironi dan kontingensi dalam bukunya *The Character of Curriculum Studies: Bildung, Curerre, and the Recurring Question of the Subject* (2011). Dalam buku tersebut, Pinar mengevaluasi kembali istilah kebenaran objektif yang sudah umum dipakai dalam pengembangan-pengembangan kurikulum. Pinar lebih mengusulkan pendekatan demokratis terhadap pengembangan kurikulum pendidikan, yaitu dengan mengintegrasikan pemikiran Rorty mengenai keberagaman narasi dan keberagaman cara pandang dalam proses pembelajaran. Roger I. Simon, seorang filsuf bidang pendidikan dari Kanada, menerapkan prinsip-prinsip dalam filsafat-sebagai-percakapan untuk mempromosikan pedagogi kritis dan pendidikan multikultural. Di dalam buku *Teaching against the Grain: Text for a Pedagogy of Possibility* (1992), Simon memperlihatkan bahwa pedagogi merupakan salah satu komponen pembentuk imajinasi sosial. Imajinasi mengenai kondisi sosial yang diharapkan inilah yang kemudian disebut sebagai visi sosial yang perlu dipakai sebagai standar rekonstitusi substansi pendidikan. Simon berpandangan bahwa bahasa yang dipakai di dalam pendidikan membentuk interaksi-interaksi yang edukatif dan konstruktif terhadap identitas kolektif. Sarana pendidikan yang efektif untuk fungsi edukatif dan konstruktif tersebut adalah aktivitas berceritera (*storytelling*). Yang pokok dalam aktivitas berceritera bukan cerita itu sendiri, melainkan dampak inklusi dan keterbukaan yang diciptakan melalui tuturan narasi. Sementara Jim W. Garrison, filsuf bidang pendidikan, memanfaatkan gagasan Rorty tentang pentingnya percakapan. Di dalam *Educational Conversation: Closing the Gap* (2012), Garrison menjajarkan pandangan Rorty dan Michael Oakeshott (1962) tentang pendidikan sebagai percakapan. Para pemikir ini memanfaatkan pokok-pokok pemikiran Rorty untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran mengenai pendidikan yang

menunjang praktik-praktik pendidikan yang demokratis dan inklusif terhadap keberagaman.

Terlihat pada pemikiran Arcilla dan Reich, prinsip-prinsip pokok dalam filsafat-sebagai-percakapan Rorty dimanfaatkan untuk mengembangkan pemikiran mengenai pendidikan yang menghasilkan warga-negara demokratis. Rorty sendiri menggambarkan hasil edifikasi sebagai ironis liberal, yaitu orang yang dengan memahami kontingensi diri, institusi, dan kebudayaannya memperjuangkan otonomi diri dan solidaritas sosial terus-menerus. Upaya untuk menghasilkan warga-negara demokratis atau ironis liberal dilakukan melalui pendidikan yang melayani proses sosialisasi dan akulturasi siswa dan mahasiswa pada kebudayaan bangsa sendiri maupun masyarakat manusia di dunia. Proses yang sama digagas oleh Ki Hadjar dengan sistem trisentra pendidikan untuk menghasilkan warga negara yang tertib dan damai.

Pandangan Rorty tentang tahapan pendidikan warga negara demokratis melalui literasi budaya senada dengan pandangan Ki Hadjar yang ditulis tiga dekade sebelumnya, tetapi dengan penekanan berbeda. Bagi Ki Hadjar, masa kanak-kanak (Taman Anak atau Masa *Wiraga*) memang merupakan masa sosialisasi dengan masyarakat dan kebudayaan sendiri, tetapi bukan lebih melalui banyaknya perolehan pengetahuan dan informasi seperti dikatakan oleh Rorty, melainkan melalui permainan, kesenian rakyat, cerita kedaerahan, dan pengenalan lingkungan. Disebut Masa *Wiraga* karena anak dibiasakan dengan ketertiban melalui tingkah laku dan aturan lahir. Sosialisasi diteruskan pada masa remaja (Taman Muda atau Masa *Wiraga-Wirama*) dengan bahan pembelajaran yang cakupan pengetahuannya lebih luas, tetapi dengan menekankan *wirama*, yakni kehalusan batin, teguhnya kemauan, dan kematangan budi pekerti. Di masa dewasa (Taman Dewasa atau Masa *Wirama*) pendidikan diarahkan pada kemampuan menyesuaikan hidup dengan dunia (alam individu, alam kebangsaan, dan alam kemanusiaan) secara tertib dan damai (mengikuti *wirama* atau ritme) (Ki Hadjar, *Pendidikan*, 80). Bagi Ki Hadjar, tujuan pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan (Ki Hadjar, *Pendidikan*, 79), yang tercapai melalui terlatihnya kemampuan fisik, intelektual, dan rohani untuk hidup secara tertib dan damai sebagai individu maupun sebagai warga negara.

1.1.4.1 Konsep kunci untuk perumusan pedagogi keberagaman

Pandangan pragmatis Rorty mengenai filsafat-sebagai-percakapan, terutama mengenai kontingensi dan proses-proses edifikasi sangat mungkin dijadikan titik tolak perumusan pedagogi keberagaman.

Meskipun bukan merupakan ulasan pokok, Rorty menghubungkan gagasan mengenai filsafat-sebagai-percakapan dengan pendidikan, yaitu dalam konsep edifikasi (PMN, 360). Edifikasi terjadi melalui aktivitas hermeneutika dan aktivitas sastra. Dengan aktivitas hermeneutika, pendidikan diarahkan pada upaya menemukan kaitan antara kebudayaan sendiri dan kebudayaan lain, atau antara disiplin yang digeluti sendiri dan disiplin lain tanpa mencari kesetangkupan atau terobsesi pada pencarian kosakata yang paling mencerminkan realitas. Dengan aktivitas sastra, pendidikan diarahkan pada penemuan tujuan-tujuan baru, kosakata baru, atau disiplin baru. Hermeneutika juga bisa diperlakukan sebagai aktivitas sastra, yaitu interpretasi kembali hal-hal di sekitar yang sudah terasa biasa dengan memakai istilah-istilah baru yang tidak biasa. Metafora dan satir sangat berguna untuk model hermeneutika sastra semacam itu. Yang prinsip pada edifikasi yang didekatkan dengan aktivitas hermeneutika dan aktivitas sastra ini adalah pilihan cara pendidikan dengan menyentuhkan pemelajar pada “cara berpikir abnormal.” Mengambil pandangan Gadamer -meskipun kategori berpikir normal dan abnormal ini diangkat oleh Rorty dari Thomas Kuhn-, Rorty mendeskripsikan karakter keabnormalan (abnormalitas) sebagai kelenturan (*sense of relativity*) (PMN, 361), bukan objektivitas. Dalam konteks pembicaraan mengenai pendidikan, istilah keabnormalan dipakai oleh Rorty untuk menjelaskan bahwa pendidikan akan berdaya edifikatif kalau tidak direduksi menjadi serangkaian instruksi mengenai materi-materi yang dihasilkan dari aktivitas intelektual normal. Keabnormalan itu juga yang dilihat oleh Rorty dari Gadamer mengenai jasa tradisi pendidikan humanis dibanding tradisi pendidikan sains. Pendidikan humanis memberi ruang pada terjadinya aktivitas intelektual abnormal yang efektif untuk perluasan kosakata dan perluasan deskripsi diri. Pendidikan sains tentu saja membantu manusia mendeskripsikan diri, meskipun pada suatu bagian saja. Rorty hanya mengajak

pembaca untuk tidak menutup mata bahwa beberapa elemen pendidikan sains menghambat proses edifikasi itu sendiri (PMN, 360).¹⁸

Selain konsep kontingensi dan edifikasi, konsep Rorty mengenai sosialisasi dan akulturasi akan dipakai untuk menjadi titik tolak perumusan pedagogi keberagaman. Pandangan Rorty khusus tentang pendidikan terdapat dalam artikel “Education as Socialization and as Individualization” [selanjutnya ESI] dalam *Philosophy and Social Hope* [selanjutnya PSH], 114-26).¹⁹ Dalam artikel tersebut Rorty mendukung pandangan Hirsch tentang “literasi budaya” (*cultural literacy*) sebagai pendekatan terhadap pendidikan sekolah dasar dan menengah. Dengan tujuan literasi budaya, siswa sekolah dasar dan menengah menjalani sosialisasi dan akulturasi melalui membaca sebanyak mungkin buku dengan fokus pada perolehan informasi sebanyak-banyaknya. Pengetahuan yang banyak dibutuhkan untuk literasi, dan kefasihan akan narasi inspiratif mengenai bangsa dan negara sendiri diperlukan untuk literasi budaya, terlebih untuk loyalitas dan kebanggaan atas bangsa sendiri (PSH, 121). Tanpa pengetahuan yang banyak yang diperoleh semasa pendidikan dasar dan menengah, sikap kritis pada diri sendiri (*self-scrutiny*) dan sikap reflektif atas diri sendiri (*self-reflectivity*) yang diharapkan terjadi pada periode pendidikan tinggi akan menjadi tugas yang terlalu berat. Menurut Rorty, sosialisasi dan akulturasi di sekolah dasar dan menengah merupakan landasan agar pemelajar bisa bersolidaritas dan terlibat dalam percakapan umat manusia (PSH, 122-4). Melengkapi pandangan Rorty ini, Castoriadis menekankan bahwa sikap kritis dan sikap reflektif merupakan elemen konstitutif pembentukan warga negara yang demokratis, sekaligus syarat konstitutif suatu tradisi demokrasi (Castoriadis, “The End,” 11).

¹⁸ Noaparast memandang pemilahan oleh Rorty mengenai objektivitas (dari sains norma dan proses akulturasi) dan solidaritas (dari edifikasi dengan kegiatan intelektual abnormal) tidak diperlukan (Noaparast, “Richard Rorty’s Conception of Education,” 80). Menurut Noaparast, akulturasi mengandaikan baik rasa suka terhadap objektivitas maupun nalar dan adu pendapat secara demokratis (Noaparast, 84).

¹⁹ Artikel ini merupakan publikasi ulang oleh Rorty atas tulisan berjudul “Education without Dogmas: Truth, Freedom, and Our Universities” (*Dissent*, Spring 1989, 198–204), (Lih. juga Noaparast, “Richard Rorty’s Conception of Education,” 80). Walaupun artikel ini tidak secara eksplisit dimaksudkan untuk membahas gagasan mengenai filsafat-sebagai-percakapan, gagasan Rorty tentang “literasi budaya” di dalam artikel tersebut, yang ia pakai sebagai pendekatan terhadap pendidikan, secara filosofis sejalan dengan gagasan tentang filsafat-sebagai-percakapan.

Penulis melihat bahwa cara pandang estetis dalam filsafat-sebagai-percakapan merupakan prinsip penting untuk dijadikan titik tolak perumusan proses-proses dalam pedagogi keberagaman. Rorty membahas tema cara pandang estetis ini di dalam PDP. Prinsip estetis yang dimaksud ialah bahwa baik pemikiran mengenai pengembangan individu maupun mengenai publik perlu menghindari model-model absolut (disebut oleh Nietzsche sebagai *the spirit of seriousness*) dan lebih mengadopsi model-model yang adaptif (disebut oleh Rorty sebagai *light-mindedness* untuk membahasakan *play* dalam ungkapan Schiller) (PDP, 268). Menurut Rorty, cara pandang estetis -yang merupakan sikap ironis terhadap dunia atau sikap tidak mengabsolutkan dunia (*the disenchantment of the world*), baik dunia privat, dunia publik, atau semesta- merupakan kendaraan penting perkembangan moral. Cara pandang estetis membantu manusia menjadi lebih pragmatis, lebih toleran, lebih liberal, dan lebih instrumental dalam memperlakukan rasionalitas (PDP, 268).

Penjelasan Rorty mengenai budaya sastra (*literary culture*, budaya tulis dan baca, budaya literasi) memberi contoh bentuk interpretasi estetis atas filsafat yang hendak dimanfaatkan untuk pengembangan individu berironi dan masyarakat liberal. Dalam budaya sastra, ditekankan aktivitas-aktivitas hermeneutik dan sastra sebagai model edifikasi. Model ini mengedepankan kritik sastra (*literary criticism*; CIS, 82; Schulenberg, "Redescription," 375),²⁰ interpretasi, dan penghargaan terhadap pluralitas pandangan (Aine, *Ironist*, 72). Dalam *Consequences of Pragmatism* [selanjutnya CP] dan *Contingency, Irony, and Solidarity*, Rorty berpandangan bahwa karya sastra memiliki kekuatan untuk membangkitkan kepekaan pembaca terhadap rasa sakit dan rasa terhina yang dialami orang lain. Karya sastra, terutama novel,²¹ memungkinkan pembaca

²⁰ Rorty menjelaskan kritik sastra (*literary criticism*) "bukan sebagai usaha mencari makna sesungguhnya dari buku-buku, bukan juga sebagai penilaian atas kontribusinya. Kritik sastra lebih dimengerti sebagai usaha mempercakapkan suatu buku dengan buku lain atau seorang tokoh dengan tokoh lain. Dengan cara itu, kritikus merevisi pandangan-pandangan, baik yang lama maupun yang baru. Pada saat yang sama, ia merevisi identitas moralnya melalui revisi kosakata akhirnya" (CIS, 80).

²¹ Rorty belajar dari Marcel Proust mengenai daya novel dalam membentuk keterbukaan seseorang. Ia menulis, "...hal yang saya pelajari dari Proust adalah bahwa daripada teori, novel merupakan medium lebih aman untuk menyampaikan pandangan mengenai relativitas dan kontingensi para penguasa. Sebab, berbeda dengan kosakata akhir dan pernyataan umum, novel biasanya bercerita mengenai manusia yang terikat oleh waktu dan terlahir dalam rajutan kontingensi. Karena tokoh-tokoh dalam novel menjadi tua dan mati -seperti usangnya buku tempat mereka dituliskan- kita tidak tergoda untuk berpikir bahwa sikap kita terhadap tokoh-tokoh tersebut adalah juga sikap kita kepada pribadi-pribadi serupa" (CIS, 107).

memasuki perspektif tokoh secara imajinatif dan dengan cara demikian membantu pembaca memperluas kemampuan bersimpati dan berkeprihatinan (PSH, 145). Selain itu, karena novel lebih bercerita mengenai “manusia” yang terikat pada tempat dan waktu, pembaca dilatih untuk merasakan sifat relatif dan kontingensi dari aneka jenis ikatan, kekuatan, dan otoritas (CIS, 107). Dalam pemikiran Rorty, agar filsafat bersifat estetis, filsafat perlu mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat dalam kesusastraan.

Memberikan pandangan mengenai teknik mengembangkan empati melalui karya sastra, Mahon Aine (*Ironist*, 2014) mengusulkan penerapan teknik “pembaca tanggap” (*reader's response*) (Aine, *Ironist*, 73). Dalam teknik pembaca tanggap, pembaca diarahkan untuk mengamati saat-saat “mengetahui” (*knowing*), dituntun untuk merasakan gerak hati, dan difasilitasi agar mengambil sikap (*deciding according to what the heart say*) serta melakukan perubahan (*transforming*). Dalam teknik pembaca tanggap, pembaca berfokus pada reaksi-reaksi dirinya terhadap novel daripada menganalisa maksud pengarang. Fokus pada maksud pengarang mendorong penemuan diri (*self-discovery*), sedangkan fokus pada reaksi diri mendukung cipta diri (*self-creation*; Schulenberg, “Redescription,” 376). Yang pertama digerakkan oleh keinginan menemukan kebenaran, yang kedua digerakkan oleh keinginan menciptakan diri. Dorongan kedua inilah yang dominan terdapat dalam budaya sastra.

Sejalan dengan pandangan Rorty bahwa kritik sastra dilakukan dengan menempatkan suatu teks berdampingan dengan teks lain (CIS, 80), pengamatan pada reaksi diri akan lebih berdampak pada percepatan pengembangan diri (deskripsi, redeskripsi, adaptasi) kalau pembaca mempertemukan reaksi-reaksi dirinya tersebut dengan reaksi pembaca lain. Hal ini dimungkinkan melalui sebuah percakapan (Laurillard, *Rethinking University*, 72). Dengan pengamatan dan percakapan, pembacaan novel dilakukan secara arif (*sapiential reading, inspiring*) daripada metodis. Aktivitas estetis demikian dimaksudkan untuk mengasah kepekaan dan rasa moral (CIS, 193-7) yang memungkinkan manusia untuk tidak berlaku kejam. Pembacaan novel secara arif juga mempersiapkan pembaca untuk melakukan aktivitas lanjut yang berfokus pada redeskripsi diri, yaitu disebut oleh Reich sebagai kritik diri (*self-scrutiny*) dan refleksi diri (*self-reflection*).

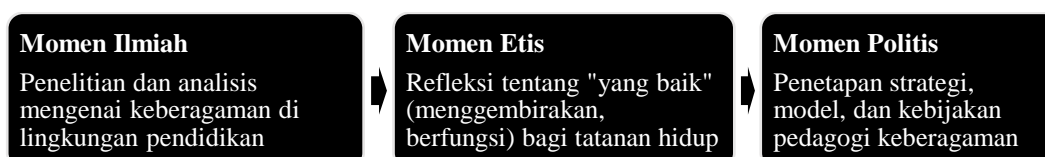
Dalam konteks perluasan kosakata, redeskripsi diri, dan solidaritas melalui karya sastra, Rorty menganggap sama penting untuk tujuan tersebut yaitu laporan jurnalisme, etnografi, buku komik, dan berita televisi (*docudrama*) (CIS, xvi, 94). Materi-materi yang disebutkan oleh Rorty itu serupa dengan yang disebut oleh Ki Hadjar sebagai sarana pendidikan *wirama*. Untuk akulturasi atau sosialisasi dengan kosakata yang telah ada di lingkungan sekitar, dan untuk mengolah rasa serta budi, perlu dimanfaatkan khasanah kesenian dan permainan daerah (Ki Hadjar, *Pendidikan*).

1.1.4.2 Menuju perumusan pedagogi keberagaman

Gagasan-gagasan Rorty mengenai filsafat-sebagai-percakapan dan budaya sastra, yang dikaji dengan gagasan-gagasan lain tentang pendidikan yang diorientasikan pada perluasan diri dan solidaritas, berpotensi memberi dimensi mengenai proses dan perangkat edifikatif yang diperlukan untuk mengedifikasikan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat berkeagaman bagi penciptaan ruang kultural terbuka.

Akan tetapi, bagaimana bisa dijelaskan secara teoretis bahwa perjuangan menciptakan ruang kultural terbuka dalam masyarakat berkeagaman memerlukan sebuah pedagogi? Menurut John R. Shook, sekolah bisa menjadi demokratis terhadap keberagaman -dan dengan itu menjadi nasionalis- dengan cara sangat natural, yaitu dengan membelajarkan fakta dan pengalaman keberagaman. Sekolah tidak bisa membuat pernyataan bahwa masyarakat plural lebih baik, sebab tidak ada penalaran apriori mengenai pluralisme atau homogenitas. Mengenai keberagaman, sekolah hanya perlu memperlihatkan situasi aktual dari keberagaman kultural dan situasi bahwa orang hidup dengan senang dalam keberagaman kultural tersebut. Fakta dan pengalaman keberagaman itulah konteks bagi pedagogi yang diselenggarakan oleh sekolah (Shook, "Pragmatism, Pluralism," 18).²²

²² Apa yang dimaksud oleh Shook ini bisa dimengerti lebih eksplisit dalam diagram yang dibuat oleh B. Herry-Priyono (2018) mengenai alur logis penetapan kebijakan dalam studi ilmu-ilmu sosial (Herry-Priyono, 279). Bila diterapkan untuk studi mengenai keberagaman, alurnya menjadi demikian:



Dengan pendapat Shook ini akan dijelaskan bahwa pedagogi keberagaman berperan dalam perjuangan ruang kultural terbuka pertama-tama melalui usahanya memperlihatkan fakta keberagaman dan pengalaman bahwa keberagaman menyenangkan. Secara teoretis bisa dijelaskan bahwa keterbukaan bermuara pada kegembiraan (PSH, xxix; ET, 15), sehingga dilihat dari perspektif etis ini, pedagogi keberagaman dimungkinkan. Secara teoretis juga bisa dilihat bahwa pedagogi keberagaman memang diperlukan, yaitu untuk melangsungkan proses sosialisasi dan akulturasi dengan fakta dan pengalaman keberagaman. Mengenai bagaimana sosialisasi dan akulturasi yang terjadi pada *agency* melalui aktivitas mental seperti hermeneutika, redeskripsi, dan perubahan kosakata itu terhubung dengan perubahan fisik seperti kebijakan (legitimasi), simbol, struktur, dan institusi yang dikategorikan dalam ranah institusional (*institutional order*), teori strukturasi Anthony Giddens akan menjadi alat bantu untuk memberikan penjelasan.²³ Meskipun persoalan teoretis ini menarik untuk dipelajari dalam proses perumusan suatu pedagogi, tetapi mengingat fokus pekerjaan disertasi ini, teori strukturasi dari Giddens, termasuk keterangan dari Shook dan Herry-Priyono yang sudah penulis sebutkan, hanya bisa disinggung saja dan tidak akan dibahas lebih lanjut dalam disertasi ini.

Sebagai catatan pada bagian akhir latar belakang pemikiran ini, konsep pedagogi keberagaman yang dirumuskan dalam disertasi ini perlu dipertimbangkan bersama faktor sosio-historis kalau akan dipakai untuk mengembangkan pendidikan keberagaman di Indonesia. Alasan sejarah jelas merupakan faktor penting untuk mendeskripsikan jenis keberagaman yang ada pada suatu konteks. Misalnya, pandangan Rorty dan Ki Hadjar Dewantara mengenai akulturasi sama-sama mengedepankan peran sosialisasi terhadap kebudayaan dan khasanah kebudayaan dalam proses pengembangan diri menjadi individu berironi dan liberal atau warga negara yang demokratis. Akan tetapi, dari perspektif sejarah diskursus keberagaman, pandangan mereka dilatarbelakangi pengalaman atau sejarah keberagaman yang berbeda. Rorty menulis dalam konteks pandangan liberal Barat yang mengedepankan otonomi. Sementara, Ki Hadjar mengemukakan pandangan-pandangannya tentang pendidikan dalam konteks masyarakat heterogen Nusantara yang

²³ Bisa dieksplorasi dari Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (Cambridge-UK: Polity Press, 1984), 25-31.

berusaha mencari titik tengah atau kesatuan. Pada pandangan liberal Barat yang lahir dari pengalaman kesatuan monarki, yang terbiasa dengan homogenitas dan kemiripan, berkembang pemikiran-pemikiran mengenai individu, hak asasi perorangan, dan pengakuan identitas. Di dalam masyarakat seperti ini, kebebasan untuk berbeda pendapat, asosiasi, atau pilihan merupakan nilai yang sangat perlu diperjuangkan. Sementara dalam masyarakat yang heterogen, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang membentuk negara kesatuan untuk bisa mewujudkan kesejahteraan umum, bentuk-bentuk persatuan seperti dasar negara, narasi nasional, keadilan distribusi, kesetaraan akses ke layanan publik, dan infrastruktur yang mendukung konektivitas antardaerah, antarprovinsi, dan antarpulau merupakan suatu nilai yang sangat perlu diperjuangkan. Dalam rangka merumuskan pedagogi keberagaman untuk lingkungan pendidikan di Indonesia, faktor historis-sosiologis-politis khas seperti ini perlu diperlakukan bersama dengan pandangan Rorty mengenai filsafat-sebagai-percakapan.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dalam disertasi ini, penulis merumuskan satu permasalahan utama. Mengapa pedagogi keberagaman penting untuk dikembangkan di Indonesia dan mengapa gagasan Richard Rorty tentang filsafat-sebagai-percakapan yang bertujuan untuk memperjuangkan ruang kultural terbuka dapat dijadikan titik tolak yang memadai bagi upaya pengembangan tersebut; serta bagaimana pedagogi keberagaman dapat menyumbangkan penjelasan serta strategi pelaksanaan rumusan standar proses dan standar kompetensi dalam kurikulum Pendidikan Nasional Indonesia?

Permasalahan utama ini akan dijawab dengan tiga rumusan anak pertanyaan. Pertanyaan pertama berkaitan dengan alasan bahwa filsafat-sebagai-percakapan memadai untuk menjadi titik tolak pragmatis penyusunan pedagogi keberagaman. Pertanyaan kedua berkaitan dengan rumusan konsep pedagogi keberagaman. Pertanyaan ketiga berkaitan dengan strategi atau pertimbangan khusus agar konsep-konsep pedagogi keberagaman berkontribusi mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat berkeagaman di Indonesia. Masing-masing anak pertanyaan dijelaskan sebagai berikut.

1) Mengapa gagasan Rorty tentang filsafat-sebagai-percakapan memadai untuk dipakai sebagai titik tolak pragmatis pengembangan pedagogi keberagaman?

Anak pertanyaan pertama ini diarahkan pada pembuatan deskripsi atas filsafat-sebagai-percakapan sebagai pragmatisme dan neopragmatisme. Meskipun dikatakan oleh Rorty sendiri bahwa secara teoretis filsafat tidak berkorelasi dengan praktik pedagogis,²⁴ filsafat-sebagai-percakapan merupakan sebuah pragmatisme. Karena dalam pragmatismenya tersebut Rorty menekankan peran bahasa dan metafora sebagai perangkat perubahan, filsafat-sebagai-percakapan disebut sebagai neopragmatisme. Baik pragmatisme yang lama maupun yang baru sama-sama ingin menjawab pertanyaan “mau menjadi apa kita” dan “bagaimana memperlakukan orang lain.” Orientasi pragmatisme ini dengan sendirinya mengarahkan konsep-konsep atau kajian filsafat-sebagai-percakapan pada gagasan-gagasan praktis mengenai “cara menjadi” dan “cara bertindak” yang bisa dikembangkan dalam sebuah pedagogi.

Pertanyaan pertama ini juga diarahkan pada analisis atas tujuan Rorty membangun filsafat-sebagai-percakapan. Rorty mengusahakan agar filsafat mampu memainkan peran terbaiknya bagi kebudayaan. Peran terbaik filsafat adalah edifikasi. Rumusan tujuan ini mengindikasikan bahwa dalam telaah oleh Rorty mengenai filsafat-sebagai-percakapan terdapat gagasan mengenai proses-proses edifikasi dan perangkat-perangkat yang diperlukan. Permasalahan pertama mengarahkan disertasi ini pada eksplisitasi aspek-aspek dalam filsafat-sebagai-percakapan yang akan berguna untuk merumuskan capaian, proses, dan strategi pedagogi keberagaman.

²⁴ Dikatakan oleh Rorty dalam “The Dangers of Over-philosophication-A Reply to Arcilla and Nicholson” (1990, 41). Di dalam ESI (dalam CIS), Rorty mendiskusikan sifat tidak relevan filsafat terhadap praktik-praktik publik seperti demokrasi, politik, termasuk pendidikan, dengan cara menjajarkan pandangan kaum kiri dan kaum kanan. Menurut Rorty, keduanya sama-sama mengorientasikan praktik pendidikan pada penyampaian penalaran dan penemuan kebenaran dasar (CIS, 115). Rorty berpendapat bahwa sebagai pengikut John Dewey ia menamai pendidikan sebagai proses sosialisasi dan individualisasi, yang bukan merupakan penerjemahan prinsip-prinsip filosofis mengenai kodrat manusia dan dasar-dasar masyarakat demokratis (CIS, 126). Bagi Rorty, sosialisasi dan individualisasi adalah proses kebebasan intelektual dalam pengembangan diri dan koordinasi sosial yang bersolidaritas, yang pertumbuhannya terlihat tidak terarah, samar, dan tidak berdaya (*fuzzy*), tetapi indah, menarik, serta memberi harapan untuk diikuti (*sublime*). Di bagian lain CIS, Rorty menjelaskan sifat tidak relevan filsafat terhadap praktik publik ini dengan mengutip Davidson yang mengatakan bahwa komunikasi dengan bahasa menyisakan jarak antara diri dan realitas, sementara perbedaan bahasa membawa serta jarak antara masyarakat manusia dan kebudayaan-kebudayaan (CIS, 14).

Pertanyaan pertama ini juga diarahkan pada pembuatan deskripsi bahwa filsafat-sebagai-percakapan akan berkontribusi pada pengelolaan kapabilitas masyarakat berkeagaman melalui pendidikan. Penulis sependapat dengan David L. Hall yang mengatakan dalam *Richard Rorty: Prophet and Poet of the New Pragmatism* (1994) bahwa filsafat yang digagas oleh Rorty merupakan bagian dari tradisi besar filsafat Amerika yang ciri utamanya adalah pluralisme estetis (Hall, 65). Menyimpulkan dari pendapat Hall ini, gagasan-gagasan dalam filsafat-sebagai-percakapan merupakan suatu estetisme yang ramah terhadap keberagaman.

2) Apa konsep dari pedagogi keberagaman yang disusun berdasarkan kajian atas filsafat-sebagai-percakapan?

Anak pertanyaan kedua ini diarahkan untuk perumusan pedagogi keberagaman secara deskriptif. Sebagai sebuah pendekatan edukatif terhadap keberagaman, konsep pedagogi keberagaman dalam disertasi ini tidak akan dirumuskan menurut seluruh kaidah unsur-unsur sebuah pedagogi pada umumnya. Akan tetapi, dari kajian tentang filsafat-sebagai-percakapan diperoleh pandangan-pandangan antifondasional mengenai pengetahuan dan hal itu akan memengaruhi pandangan mengenai tujuan aktivitas intelektual dan cara melakukannya. Dari gagasan antifondasional ini dikembangkan rumusan capaian pembelajaran dan konsep mengenai perkembangan diri (*bildung* dan edifikasi) serta perangkat-perangkat manusiawi yang perlu dikembangkan. Aktivitas intelektual dipahami sebagai perluasan diri dan perluasan kosakata dengan mendayagunakan afeksi dan imajinasi. Oleh karena itu, semua sarana yang mengembangkan bahasa, afeksi, dan imajinasi seperti pembelajaran sastra,²⁵ ketrampilan melakukan perjumpaan, dan kemampuan melakukan komunikasi apresiatif perlu dijadikan sasaran pembelajaran. Dari filsafat-sebagai-percakapan juga diperoleh pandangan mengenai proses-proses edifikasi. Proses-proses tersebut dikaji dan dirumuskan sebagai proses pedagogis dalam pedagogi keberagaman. Perumusan proses-proses pembelajaran ini mempertimbangkan kapabilitas

²⁵ Rorty menekankan pentingnya membaca karya sastra, terutama novel, untuk “*sentimental education.*” Lih. Rorty, “Heidegger, Kundera, and Dickens” [HKD] (Dalam *Essays on Heidegger and Others: Philosophical Papers 2* [EHO], New York: Cambridge Univ. Press, 1991), 78.

yang dimiliki oleh masyarakat berkeberagaman, misalnya kemampuan melakukan interaksi dalam bentuk perjumpaan dan percakapan.

3) Bagaimana konsep pedagogi keberagaman berkontribusi dalam pengembangan pendidikan berbasis keberagaman dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia?

Anak pertanyaan ketiga didasari asumsi bahwa persoalan keberagaman di Indonesia perlu dilihat dalam kategori politis dan historis. Sebagai persoalan politis, keberagaman di Indonesia bisa dilihat sebagai bagian dari dua tradisi politik yang disebut oleh Charles Taylor (1994) sebagai politik kesetaraan dan politik perbedaan (Taylor, "The Politics of Recognition," 37-8). Keberagaman sebagai politik kesetaraan adalah diskursus untuk memperjuangkan penghargaan dan hak yang sama bagi setiap orang; sementara sebagai politik perbedaan, keberagaman merupakan diskursus untuk memperjuangkan pengakuan atas sekelompok masyarakat yang mengikat diri dengan identitas tertentu (Taylor, "The Politics of Recognition," 41-2). Dilihat dari perspektif Taylor tersebut, secara negatif diskursus keberagaman di Indonesia berarti usaha mengatasi gangguan terhadap kesetaraan penghargaan dan hak setiap individu, serta usaha mengatasi gangguan yang muncul dari upaya kelompok-kelompok suku, bahasa, agama, adat-istiadat, dan golongan dalam mendapatkan pengakuan. Disertasi ini memang akan menyinggung bagaimana penanganan kasus keberagaman telah dilakukan, tetapi hal itu dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa bahasa penanganan kasus mempersempit pengertian keberagaman itu sendiri. Usaha mendekatkan konsep pedagogi keberagaman pada pendidikan nasional di Indonesia dalam disertasi ini akan diwarnai pengertian positif atas keberagaman. Secara positif, diskursus keberagaman berorientasi pada pengembangan kemerdekaan, akses atas fasilitas umum, perlindungan yang setara bagi setiap orang, dan ruang yang terbuka bagi setiap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam pencapaian tujuan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Shook bahwa tidak ada *a priori* terhadap pluralisme maupun homogenitas, pedagogi keberagaman yang dikembangkan dalam pengertian positif atas keberagaman lebih menjanjikan kajian lebih kaya atas fakta dan pengalaman atas keberagaman. Oleh karenanya, untuk menjawab pertanyaan ketiga ini dinyatakan bahwa pedagogi keberagaman dikembangkan dengan

berawal dari pengalaman keberagaman, dengan memanfaatkan kapabilitas yang terdapat dalam masyarakat berkeragaman, dan dengan tujuan memperjuangkan kelangsungan keberagaman.

1.3 Tesis Disertasi

Dalam disertasi ini dirumuskan tiga tesis.

1.3.1 Rumusan Tesis

Rumusan ketiga tesis tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Pragmatisme baru, konsep edifikasi, dan pluralitas estetis dalam filsafat-sebagai-percakapan merupakan titik tolak memadai untuk pengembangan konsep capaian pendidikan, tradisi intelektual, serta proses pemelajaran dan pembelajaran dalam pedagogi keberagaman.
- 2) Pedagogi keberagaman merupakan pendekatan pendidikan dengan pembelajaran rekontekstualisasi berbasis perjumpaan, pembelajaran rekonsiliasi, dan pembelajaran komunikasi apresiatif dengan memanfaatkan kapabilitas masyarakat berkeragaman untuk memajukan tradisi intelektual yang terbuka, mendorong transformasi individu-individu, dan memberi wawasan mengenai upaya-upaya perluasan diri dan kemampuan bersolidaritas.
- 3) Ditempatkan sebagai salah satu sistem penunjang Pendidikan Nasional Indonesia, wawasan dan konsep dalam pedagogi keberagaman berkontribusi dalam bentuk penjelasan dan perumusan strategi pelaksanaan kurikulum Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu dengan rumusan pendidikan sebagai proses perluasan diri dan penguatan kemampuan bersolidaritas, dan rumusan strategi pendidikan konversasional, reflektif, dan komunikatif untuk mengembangkan budaya sastra, kemampuan berpikir kritis, imajinasi, interaksi apresiatif, dan politik kebudayaan.

1.3.2 Penjelasan tesis

Tesis pertama disertasi ini berisi pernyataan bahwa filsafat-sebagai-percakapan merupakan pragmatisme baru yang mengembangkan konsep edifikasi dan pluralitas estetis untuk memperjuangkan ruang kultural terbuka. Filsafat-sebagai-percakapan merupakan neopragmatisme yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan “mau menjadi apa kita” dan “bagaimana kita memperlakukan orang lain.” Dalam menjawab pertanyaan mau menjadi apa kita, filsafat-sebagai-percakapan mengembangkan gagasan mengenai profil berirani dan liberal. serta utopia ruang kultural terbuka. Dengan gagasan tersebut, peran terbaik dari filsafat bisa dijelaskan yaitu, edifikasi. Untuk menjalankan proses edifikasi itu, filsafat bertindak sebagai salah satu suara dalam percakapan umat manusia. Proses edifikasi melalui filsafat dijalankan melalui aktivitas redeskripsi kosakata dan kebudayaan yang diarahkan pada penemuan kosakata yang paling bisa dipakai untuk mengungkapkan diri. Proses edifikasi melalui filsafat itu ditingkatkan kemampuan edifikatifnya dengan transformasi dari tradisi filsafat ke kesusastraan. Dalam budaya sastra, filsafat mendayagunakan kekuatan bahasa sastra, narasi, imajinasi, dan emosi untuk melakukan kritik sastra. Kritik sastra sebagai model pembangunan ilmu pengetahuan merupakan sebuah praktik percakapan. Struktur dari percakapan itu meliputi proses sosialisasi, rekontekstualisasi, rekonsiliasi, dan redeskripsi. Model filsafat yang bertransformasi menjadi model percakapan merupakan model edifikasi manusia dan pembangunan pengetahuan yang mengedepankan inklusivisme, pentingnya partikularitas dan keberagaman perspektif. Semua unsur tersebut memperlihatkan bahwa gagasan Rorty mengenai filsafat-sebagai-percakapan merupakan sebuah gagasan mengenai pluralitas.

Dalam rangka menjawab pertanyaan bagaimana memperlakukan orang lain, filsafat-sebagai-percakapan dikembangkan dengan apropriasi terhadap kesadaran akan kontingensi. Kesadaran akan kontingensi ini membentuk ruang kultural yang terbuka. Dalam kesadaran akan kontingensi itu, perbedaan privat dan publik sebagai realitas yang tidak akan setangkep selamanya dipahami sebagai metafora mengenai “ada bersama” dan “berjalan bersama.” Masing-masing tidak absolut, sehingga tidak perlu meniadakan yang lain. Keduanya perlu ada tetapi perannya berbeda. Ruang kultural terbuka merupakan tempat bagi keberagaman privat dan publik untuk ada dan menjalankan perannya. Dalam

ruang kultural terbuka, tidak diperlukan visi universal, teori untuk mempersatukan, atau kosakata tunggal untuk mewadahi semua perspektif dan keyakinan. Walaupun demikian, yaitu bahwa masing-masing unsur merupakan kontingensi, selalu ada kemungkinan baru untuk dilakukan redeskripsi dengan kekuatan imajinasi. Itulah ruang kultural terbuka yang menjadi utopia ruang bagi keberagaman. Yang diusahakan dalam ruang kultural terbuka itu adalah percakapan dan kelangsungan percakapan. Moralitas yang diperlukan dalam ruang kultural terbuka adalah prinsip tidak kejam dan tidak menghina.

Semua deskripsi mengenai filsafat-sebagai-percakapan dan ruang kultural terbuka oleh Rorty ini memadai untuk dipakai sebagai ancangan konsep capaian pendidikan, tradisi intelektual dan pengetahuan, serta proses pembelajaran dan pembelajaran pedagogi keberagaman, yang berpangkal dari kapabilitas bahasa, kebudayaan, identitas, relasi sosial, dan institusi masyarakat berkeberagaman.

Tesis kedua disertasi ini menyatakan pedagogi keberagaman merupakan pendekatan pendidikan dengan pembelajaran rekontekstualisasi berbasis perjumpaan, pembelajaran rekonsiliasi, dan pembelajaran komunikasi apresiatif dengan memanfaatkan kapabilitas masyarakat berkeberagaman untuk memajukan tradisi intelektual yang terbuka, mendorong transformasi individu-individu, dan memberi wawasan mengenai upaya-upaya perluasan diri dan kemampuan bersolidaritas. Proses edifikasi dalam pedagogi keberagaman dilakukan dengan berbasis pada perjumpaan, yang secara lebih konkret dilakukan dalam pembelajaran sastra yang dilakukan secara reflektif²⁶ dan konversasional²⁷ untuk

²⁶ Model refleksi yang ditawarkan di dalam pedagogi keberagaman didasarkan pada pandangan Rorty bahwa fenomena mental, misalnya intuisi, merupakan peristiwa pengenalan seseorang dengan permainan bahasa yang ia pakai. Untuk tahu sumber dari intuisi tersebut, orang perlu menghidupkan kembali sejarah dari permainan bahasa tersebut. Artinya, orang diajak memasuki ranah filosofis permainan bahasa dari bahasa yang dia pakai (PMN, 34, 252). Itulah model refleksi yang ditawarkan oleh Rorty.

²⁷ Pandangan Rorty mengenai percakapan merujuk pada tulisan Michael Oakeshott dalam *Rationalism in Politics and Other Essays* (London: Methuen & Co. Ltd., 1962). Oakeshott menulis, “Dalam suatu percakapan, peserta tidak melakukan penyelidikan atau berdebat; tidak ada ‘kebenaran’ untuk ditemukan, tidak ada pernyataan yang harus dibuktikan, tidak ada kesimpulan untuk dicari. Mereka tidak ingin memberitahu, membujuk, atau saling menyanggah, sehingga daya pengaruh perkataan mereka tidak tergantung pada fakta bahwa mereka memakai idiom yang sama; mereka bisa saja berbeda tetapi tanpa berbantahan... Dalam percakapan, ‘fakta’ ditempatkan kembali menjadi kemungkinan-kemungkinan; ‘kepastian’ diperlakukan menjadi sesuatu yang bisa berubah, bukan karena disandingkan dengan kepastian lain atau kesangsian, tetapi karena dipertemukan dengan gagasan dari ranah berbeda; perhitungan-perhitungan dihasilkan dari gagasan-gagasan yang biasanya dianggap tidak berhubungan” (Oakeshott, 198). “Percakapan bukan perang iklan untuk mencari keuntungan, bukan kontes untuk

pendidikan afeksi. Idealisme dari konsep edifikasi itu akan menentukan rumusan-rumusan pedagogi keberagaman mengenai capaian pendidikan, pandangan mengenai pengetahuan, peran pembelajar, dan perangkat-perangkat pembelajaran yang perlu dikembangkan. Dirumuskan dari kajian atas filsafat-sebagai-percakapan, pedagogi keberagaman bisa dilihat sebagai pendekatan terhadap pendidikan untuk mempersiapkan pemelajar dengan ketrampilan-ketrampilan hidup berkeragaman maupun ketrampilan cipta diri yang dipelajari dari kapabilitas masyarakat berkeragaman, yaitu perluasan diri terus-menerus dan kemampuan bersolidaritas.

Tesis ketiga menyatakan bahwa kontribusi dari konsep pedagogi keberagaman terhadap sistem pendidikan nasional di Indonesia bisa dilihat dari posisinya sebagai salah satu sistem penunjang pelaksanaan pendidikan. Ditempatkan sebagai salah satu sistem penunjang Pendidikan Nasional Indonesia, wawasan dan konsep dalam pedagogi keberagaman berkontribusi dalam bentuk penjelasan dan perumusan strategi pelaksanaan kurikulum Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu dengan rumusan pendidikan sebagai proses perluasan diri dan penguatan kemampuan bersolidaritas, dan rumusan strategi pendidikan konversasional, reflektif, dan komunikatif untuk mengembangkan budaya sastra, kemampuan berpikir kritis, imajinasi, interaksi apresiatif, dan politik kebudayaan.

Disertasi ini juga memperlihatkan bahwa implementasi konsep pedagogi keberagaman untuk konteks pendidikan di Indonesia perlu mempertimbangkan faktor sosio-historis dari diskursus keberagaman di Indonesia. Faktor pertama adalah tiga lingkup diskursus keberagaman di Indonesia, yakni komunalitas, komitmen kenegaraan, dan nasionalisme kebangsaan (*civic nationalism*). Dua faktor yang akan bermanfaat untuk implementasi pedagogi keberagaman adalah kekuatan iluminasionisme dan rekonsiliasi interkultural dalam pengalaman masyarakat Indonesia. Faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah cita-cita kesejahteraan bersama yang merupakan upaya rekonsiliatif untuk menghargai kreativitas berbasis komunalitas. Menurut penulis, komunalitas merupakan

memperebutkan piala, bukan juga suatu eksegese; percakapan adalah pengembaraan intelektual yang tidak direncanakan sebelumnya... Tepatnya, percakapan tidak mungkin terjadi tanpa keberagaman suara (*a diversity of voices*): dalam percakapan, aneka diskursus bertemu, mengerti satu sama lain tetapi dalam suatu relasi yang santai yang tidak menuntut atau merencanakan bahwa suatu waktu akan bisa menjadi satu” (Oakeshott, 177-9).

kebijaksanaan turun-temurun dan akumulatif dari masyarakat Indonesia yang telah kenyang dengan pengalaman keberagaman.

Kesulitan besar yang ada dalam diskusi mengenai keberagaman terdapat dalam besarnya varian definisi keberagaman. Meskipun demikian, kajian-kajian mengenai keberagaman selalu merekomendasikan keterbukaan terhadap perbedaan, misalnya keterbukaan terhadap perbedaan usia, kelas, suku bangsa, gender, kesehatan, kemampuan fisik dan mental, agama, jenjang pendidikan, pekerjaan, ciri kepribadian, dan aneka ciri lain pada manusia. Keterbukaan terhadap perbedaan, sebagai persoalan pokok keberagaman - dengan demikian juga merupakan perhatian utama pedagogi keberagaman-, merupakan problem perilaku yang lebih tepat didekati secara pragmatis dan bukan dengan pertamanya mengatur definisi yang bervariasi mengenai keberagaman itu.

Konsep-konsep mengenai keberagaman memiliki nilai hanya kalau mengalami redeskripsi dan mendapatkan kosakata baru. Konsep-konsep mengenai keberagaman, misalnya yang menyangkut definisi, fenomena, dan kasusnya, perlu selalu merupakan konsep terbuka, yaitu bisa dideskripsikan ulang dan bisa dinamai dengan kosakata baru. Isi konsep ketiga hal tersebut tidak akan sama dari waktu ke waktu, karena tergantung pada persoalan keberagaman paling relevan. Ilmu sosial, misalnya, memberi isi konsep pada istilah keberagaman dengan empat aspek, yaitu komposisi jumlah dalam suatu ekosistem; perbedaan budaya antarsatuan etnik, bangsa, dan gender; manfaat keberagaman untuk tujuan bisnis; dan kesenjangan (*inequality*) kekuatan (*power*), peluang (*privilege*), dan kekayaan (*wealth*).²⁸ Pedagogi keberagaman bisa saja memakai isi konsep istilah keberagaman seperti yang disampaikan oleh ilmu sosial tersebut, yaitu kalau isi konsep tersebut sesuai konteks baru dan bahkan memberi kosakata baru.²⁹ Dalam

²⁸ Lih. Fred L. Pincus, "Diversity," dalam W. A. Darity, Jr. (Ed.), *International Encyclopaedia of the Social Sciences* (Edisi 2, Vol. 2, 2008, Detroit: Macmillan Reference USA), 419-420.

²⁹ Merujuk pada Nietzsche dan Derrida, Rorty memahami kosakata sebagai hasil dari keputusan otonom seseorang (CIS, 60-dst.). Kosakata akhir dipakai untuk mengungkapkan sejarah hidup, terkadang untuk memaknai peristiwa yang sudah terjadi (*hindsight*), di lain waktu untuk memprediksi yang akan terjadi (*a set of words which they employ to justify their actions, their beliefs, and their lives*). Disebut "akhir" karena tidak ada lagi rujukan di luar kosakata tersebut, sehingga kalau diteruskan, yang ada hanya argumen tak berujung saja (CIS, 127). Rorty memahami kosakata dalam perspektif dialektika Hegel, yaitu sebagai permainan kata untuk mengoreksi atau mengganti kata lain. Hanya saja berbeda dengan Hegel, kosakata dalam pemahaman oleh Rorty ini merupakan kosakata yang selalu berubah dan selalu berganti isi

kasus seperti itu, kosakata lama tidak dipakai bukan karena keliru, melainkan karena tidak relevan lagi (*outdated*), sementara kosakata baru dinilai berdasarkan kemampuannya menjawab tantangan (*updated*) (CIS, 135).

1.4 Argumentasi Kebaruan

Kebaruan pertama terdapat dalam konsep rekonsiliasi sebagai prinsip proses pedagogi. Dalam pedagogi keberagaman, rekonsiliasi dimengerti sebagai cara seseorang mereaksi perbedaan dan keberagaman perspektif. Rekonsiliasi terjadi dalam diri subjek, yaitu ketika orang dalam kemerdekaannya mengambil keputusan untuk berjalan bersama dan ada bersama dengan perbedaan dan keberagaman yang sedang dihadapinya. Konsep rekonsiliasi dalam pedagogi keberagaman tidak dimengerti sebagai harmoni, resolusi akhir atas perbedaan, atau perolehan visi tunggal atas keberagaman.³⁰ Ketiga istilah ini merujuk pada kondisi kesetangkupan. Konsep rekonsiliasi dikembangkan dari model relasi antara privat dan publik menurut Rorty, yakni dua ranah yang tidak bersetangkup dan tidak saling mengandaikan, tetapi keduanya diperlukan. Namun demikian, konsep rekonsiliasi tidak hanya merupakan aktivitas dinamis seperti dalam penjelasan Rorty, yaitu aktivitas pengembangan otonomi dan aktivitas pengembangan relasi sosial. Relasi ada bersama dan berjalan bersama dalam konsep rekonsiliasi dijelaskan dengan memakai kosakata dari Mikhail Mikhailovich Bakhtin *svoboda* (kemerdekaan, yakni gerak batin tanpa dalih) dan *postupok* (tindakan, yakni orientasi batin pada tindakan etis). Dalam pengertian Bakhtin, baik kemerdekaan maupun tindakan merupakan dinamika.

cerita ketika sedang dipakai. Bagi Rorty, kosakata adalah ciptaan manusia sama seperti puisi, teori ilmiah, dan konsep tentang masa depan, sehingga perlu berubah agar bisa berfungsi lebih baik dalam memberikan deskripsi (CIS, 53). Dalam konteks ini, kosakata lama yang harus berubah tidak dipandang sebagai keliru (*misguided*), tetapi sebagai kosakata yang sudah tidak selazimnya (*outdated language*) (CIS, 135). Bahwa suatu kosakata lebih deskriptif bukan berarti bahwa kosakata tersebut lebih mencerminkan realitas (TP, 125).

³⁰ Chantal Mouffe menginterpretasikan bahwa demokrasi yang dicita-citakan oleh Rorty diarahkan pada harmoni, konsensus, dan rekonsiliasi. Ia menilai bahwa istilah-istilah tersebut mengandaikan ketiadaan konflik. Pada Rorty, harapan akan politik konsensus tanpa konflik semacam itu berasal dari pemilahan yang terlalu tegas atas privat dan publik. Mouffe sendiri berpandangan bahwa dalam politik selalu ada pertentangan (*antagonis*). Lih. Chantal Mouffe, "Deconstruction, Pragmatism, and Politics of Democracy," dalam Critchley, S., J. Derrida, E. Laclau, & R. Rorty, *Deconstruction and Pragmatism*, (Ed. Chantal Mouffe. London & New York: Routledge, 1996), 9.

Kemerdekaan (*svoboda*), yakni gerak batin tanpa dalih, mengandung di dalamnya tindakan etis (*postupok*). Kemerdekaan, yang dalam kosakata Rorty dipahami sebagai otonomi untuk berirani di ranah privat, adalah tindakan etis, yang oleh Rorty disebut liberal di ranah publik. Tindakan etis adalah kegembiraan yang mungkin terjadi dalam kemerdekaan. Konsep rekonsiliasi dalam pedagogi keberagaman mengandung pengertian dinamis gerak batin tanpa dalih dan tindakan etis. Nama teoretis rekonsiliasi dalam keberagaman itu adalah kemerdekaan batin dan tindakan etis. Isinya adalah aktivitas ada bersama dan berjalan bersama.

Konsep rekonsiliasi dalam pedagogi keberagaman menjelaskan bahwa keberagaman tidak setangkup dengan adanya pertentangan (*antagonis*) seperti dalam pemikiran Mouffe, tidak setangkup juga dengan pemilahan ketat antara privat dan publik seperti dipikirkan oleh Rorty. Konsep rekonsiliasi menjelaskan bahwa kegembiraan terjadi dalam keberagaman. Wujud kegembiraan itu antara lain relevansi, apresiasi, dan toleransi.

Disertasi ini memperlihatkan bahwa percakapan merupakan instrumen paling penting dalam implementasi pedagogi keberagaman. Istilah percakapan di dalam disertasi ini dideskripsikan lebih luas daripada yang dipakai oleh Rorty. Rorty memakai istilah percakapan untuk mendeskripsikan tradisi filsafat yang ia perjuangkan, yaitu filsafat yang memandang diri bukan sebagai disiplin ilmu (*philosophy as inquiry*), melainkan sebagai salah satu suara dalam percakapan umat manusia. Dalam konteks ini, Rorty menekankan perubahan atau penggantian kosakata karena hal itu membantu filsafat bisa bercakap-cakap dengan suara lain secara terbuka dan beradab (*open and civilized conversation*) (PMN, 392-4). Di dalam disertasi ini, percakapan dipahami bukan lebih sebagai kontingensi sebuah disposisi, melainkan sebagai interaksi interpersonal secara verbal di dalam proses pembelajaran, yang dilakukan dengan metode apresiatif, di dalam tahap-tahap yang dirancang bisa menghasilkan pengalaman rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi dalam percakapan di dalam pedagogi keberagaman dilatihkan dengan cara diam dan memperhatikan gerak batin yang timbul ketika menghadapi bentuk-bentuk keberagaman dan dengan mengungkapkan reaksi apresiatif, merdeka, dan bernilai terhadap gerak batin

tersebut. Interaksi yang dirancang agar berfokus pada komunikasi mengenai gerak batin ini akan memfasilitasi terjadinya interkulturasi.³¹

Pada disertasi ini ditekankan bahwa konsep rekonsiliasi perlu ada dalam konsep pedagogi keberagaman. Konsep rekonsiliasi memberi penjelasan atas dua hal. Pertama, konsep rekonsiliasi menjelaskan pentingnya percakapan dalam pembelajaran dan mengapa dalam pembelajaran yang bersifat konversasional pemelajar dan pembelajar perlu memperhatikan dinamika perasaan, pikiran, kehendak, dan imajinasinya. Kedua, konsep rekonsiliasi menjelaskan proses yang perlu ada dalam rangkaian aktivitas intelektual yang diarahkan pada interkulturasi. Interkulturasi diharapkan menjadi jalan bagi individu-individu agar diperkaya oleh kebudayaan lain maupun kebudayaannya sendiri.

Kebaruan kedua terdapat dalam konseptualisasi kontribusi pedagogi keberagaman dalam pengembangan pendidikan keberagaman di Indonesia melalui kurikulum pendidikan nasional. Didekatkan pada rumusan standar kompetensi dan standar proses dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia, konsep-konsep dalam pedagogi keberagaman memberi penjelasan dan strategi pelaksanaan pada konsep standar-standar pendidikan nasional Indonesia tersebut, terutama mengenai literasi, akulturasi, dan interaksi.

Pedagogi keberagaman bisa berkontribusi dalam perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan kesejahteraan umum dengan memberi deskripsi mengenai proses pembinaan ruang privat. Pendidikan dianggap sebagai ranah privat karena melibatkan proses pembelajaran dan pengembangan individu. Ini mencakup aspek-aspek seperti penguasaan keterampilan, pengembangan karakter, dan pertumbuhan pribadi. Sisi ini menekankan peran keluarga dan individu dalam membentuk pendidikan sebagai suatu hal

³¹ Konsep interkulturasi yang dimaksud di sini adalah seperti yang diungkapkan ARPN Arturo Sosa, S.J. dalam pidatonya di INTERNATIONAL CONGRESS FOR JESUIT EDUCATION DELEGATES-JESEDU-Rio2017 di Rio de Janeiro, Brazil, 20 Oktober, 2017, berjudul “Jesuit Education: Forming Human Beings in Harmony with Their Fellows, with Creation and with God.” Arturo Sosa memberi ilustrasi tentang interkulturasi itu demikian: “Idealnya, setiap orang atau setiap bangsa bisa merasa bahwa dirinya adalah bagian dari seluruh umat manusia, dan sekaligus sadar akan kulturnya sendiri (*enculturation*), tanpa membuat kebudayaan sendiri itu absolut. Itu dilakukan seraya mengakui secara kritis dan mensyukuri keberadaan orang lain yang memiliki kebudayaan berbeda (*multiculturality*), dan membangun relasi yang setara dengan mereka, memperkaya diri dengan kebudayaan yang beragam itu termasuk kebudayaannya sendiri (*interculturality*). Sikap terbuka terhadap aneka budaya (*universality*) yang dijalani dengan cara demikian bisa merupakan cara untuk mengusahakan keadilan sosial, persaudaraan, dan kedamaian.”

yang bersifat pribadi dan individual. Di sisi lain, pendidikan juga dianggap sebagai ranah publik karena memiliki dampak yang lebih luas pada masyarakat dan negara. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk warganegara, menyampaikan nilai-nilai sosial, dan mempersiapkan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Pendidikan dianggap sebagai investasi sosial yang dapat membentuk masa depan masyarakat. Sadar akan ruang lingkungannya, pembinaan ranah privat dalam pedagogi keberagaman merupakan humanisasi yang berdampak perluasan diri, yaitu dengan cara mengembangkan keberfungsian individu-individu dalam memberi ruang untuk energi kreatif. Misalnya, individu semakin mampu menyediakan tempat yang berkualitas-terbuka-energik-beragam dan mampu memberi pengakuan atas kekayaan yang terdapat dalam keberagaman.

1.5 Tujuan Disertasi

Disertasi ini ditulis dengan tujuan merumuskan pedagogi keberagaman bertitik tolak dari filsafat-sebagai-percakapan. Perumusan dilakukan dengan cara menjawab tiga masalah penelitian. Hasil perumusan pedagogi keberagaman melalui disertasi ini merupakan sumbangan pertama-tama untuk pemikiran mengenai keterbukaan ruang kultural dalam masyarakat berkeagaman. Disertasi ini memperlihatkan bahwa proses pedagogis rekontekstualisasi, rekonsiliasi, dan komunikasi apresiatif bisa berkontribusi dalam perjuangan menjaga keterbukaan ruang kultural. Untuk konteks Indonesia, ketiga proses pembelajaran ini diarahkan pada pembentukan pribadi yang memiliki komitmen pada tujuan pendirian negara Indonesia, yakni kesejahteraan umum berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen individu dibentuk melalui ketelitian dan ketrampilan rekonsiliatif dalam mengelola gerak batin ketika berhadapan dengan fakta dan pengalaman keberagaman.

Kedua, karena hasil disertasi ini berbentuk rumusan pedagogi, disertasi ini bisa merupakan sumbangan atau bisa dimanfaatkan oleh institusi pendidikan untuk memilih strategi pengembangan kualitas manusia yang mampu menghidupi keberagamannya. Kekhasan pedagogi yang dirumuskan dalam disertasi ini terletak pada premis-premis yang dibangun pada pandangan mengenai kontingensi, kekhasan historisitas diskursus

keberagaman di Indonesia (aspek komunalitas keberagaman), perjumpaan, dan rekonsiliasi. Implementasi pedagogi dengan premis-premis khas tersebut diharapkan memicu tumbuhnya refleksi baru atas kebijakan-kebijakan, kesepakatan, dan cara bertindak untuk mencapai kesejahteraan umum.

Ketiga, disertasi ini bisa menjadi titik tolak refleksi lebih lanjut mengenai kekhasan diskursus keberagaman di Indonesia. Kekhasan tersebut menjadi alasan untuk melakukan redeskripsi atas istilah-istilah yang secara umum telah dipakai untuk mengelola keberagaman, seperti istilah multikulturalisme, hak asasi, dan kebebasan, kemudian memberikan perluasan pandangan melalui istilah percakapan apresiatif, interkulturalitas, dan tujuan bersama (*we-intentions*). Lebih lanjut, disertasi ini memperlihatkan bahwa kontingensi relasi antara privat dan publik yang dijembatani dengan istilah relevansi bisa menjadi titik tolak refleksi atas pola-pola fondasionalisme dalam praktik-praktik pendidikan di Indonesia. Pola tersebut terlihat dalam rumusan-rumusan pedagogis atau kurikuler sambung padan (*link and match*) yang didasari pandangan bahwa persoalan sosial akan terselesaikan kalau pendidikan sudah dibenahi atau dilengkapi dengan program-program yang bersambung bersepadan dengan kebutuhan. Dengan kata lain, pendidikan dikelola berdasarkan persoalan sosial yang hendak diselesaikannya. Sama maknanya ketika pendidikan dipandang sebagai solusi untuk mencapai kepentingan kenegaraan. Pembebanan penyelesaian persoalan sosial dan kepentingan kenegaraan kepada pendidikan berakibat penyamarataan program pendidikan sesuai kepentingan negara atau sesuai teori tertentu yang diyakini negara. Akibatnya adalah pencideraan langsung atas kebebasan intelektual yang menjadi jantung pendidikan. Diskursus keberagaman menginspirasi bahwa komunalitas adalah sebuah kekayaan kultural. Dengan kekayaan kultural itu pendidikan dikelola dan dikembangkan.

1.6 Metode Penulisan Disertasi

Disertasi ini dikerjakan dengan metode kajian pustaka. Gagasan Rorty mengenai filsafat-sebagai-percakapan akan dikaji berdasarkan buku sumber utama tema tersebut, yaitu buku *Philosophy & the Mirror of Nature* (PMN, 1979). Karena gagasan-gagasan mengenai keterbukaan yang menjadi unsur penting dalam perumusan pedagogi

keberagaman disampaikan secara germinal pada buku pokok mengenai filsafat-sebagai-percakapan, gagasan itu diperdalam dan dilengkapi melalui kajian gagasan Rorty di empat teks lain, yaitu buku *Contingency, Irony, and Solidarity* (CIS, 1989), buku *Philosophy as Social Hope* (PSH, 1999), paper “Objectivity, Relativism, and Truth” (ORT, 1991), dan paper “Truth and Freedom: A Reply to Thomas McCarthy” (TF, 1990). Tulisan-tulisan tersebut memberikan dasar untuk merumuskan prinsip proses dan prinsip instrumental bagi pedagogi keberagaman.

Aspek-aspek praktis pada pedagogi keberagaman diteliti terutama pada teks-teks karya Rorty mengenai pragmatisme, kebebasan, dan politik. Teks yang sangat membantu untuk keperluan tersebut adalah buku *Consequences of Pragmatism* (CP, 1982), buku *Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth Century America* (AOC, 1998), dan sebuah artikel di *New York Times* “The Unpatriotic Academy” (UA, 1994) yang juga dimuat dalam kumpulan esai *Philosophy as Social Hope*. (PSH, 199). Teks mengenai bahasa dan sastra diteliti selain melalui “Truth and Freedom” dan teks yang sudah disebut sebelumnya juga melalui paper “Hermeneutics, General Studies, and Teaching” (1982), artikel “The Fire of Life” (2007), dan *An Ethics for Today: Finding Common Ground between Philosophy and Religion* [ET] (2008).

Bacaan-bacaan lain yang disebutkan dalam daftar referensi merupakan bahan pengayaan informasi mengenai diskursus keberagaman, pemanfaatan pemikiran-pemikiran Rorty untuk pendidikan, dan mengenai percakapan.

1.7 Kerangka Disertasi

Disertasi ini berisi enam bab. Pada **Bab I Pendahuluan** dijelaskan latar belakang pemikiran disertasi, permasalahan utama dan tiga anak pertanyaan yang ingin dijawab, dan tujuan penulisan disertasi.

Bab II Filsafat-sebagai-Percakapan sebagai Titik Tolak Pragmatis Pedagogi Keberagaman berisi eksplorasi gagasan Rorty mengenai filsafat-sebagai-percakapan. Di dalam pemaparan eksploratif ini dijelaskan bahwa filsafat-sebagai-percakapan merupakan

tradisi filsafat berorientasi hermeneutika yang dikembangkan oleh Rorty dalam rangka terapi terhadap tradisi filsafat yang berorientasi epistemologi. Paparan mengenai filsafat-sebagai-percakapan ini distrukturkan dengan eksplorasi tiga pokok, yaitu filsafat-sebagai-percakapan sebagai pragmatisme, budaya sastra sebagai kondisi berfungsinya filsafat-sebagai-percakapan, dan peran edifikasi dari filsafat-sebagai-percakapan pada keberfungsian subjek secara sosial.

Dengan kerangka tiga pokok tersebut, didapatkan ulasan atas prinsip proses dan prinsip instrumental dari filsafat-sebagai-percakapan. Kedua prinsip tersebut akan dipakai sebagai gagasan induk pedagogi keberagaman. Prinsip proses dari filsafat-sebagai-percakapan terdapat dalam konsep edifikasi sebagai gambaran peran terbaik filsafat, karya susastra dan kritik sastra sebagai model aktivitas intelektual filsafat, serta demokrasi sebagai arah transformasi yang dikerjakan melalui filsafat. Prinsip instrumental dari filsafat-sebagai-percakapan terdapat dalam konsep pemilahan privat-publik, konsep temporalitas, dan konsep kontingensi.

Bab III Ruang Kultural Terbuka berisi ulasan istilah yang dalam filsafat-sebagai-percakapan disebut oleh Rorty sebagai ruang-kultural-terbuka. Ulasan mengenai konsep ruang kultural terbuka ini dibuat dalam bab tersendiri karena memuat gagasan kompleks yang akan menyangkut dinamika dalam pedagogi keberagaman. Ulasan ini akan meliputi definisi dari istilah ruang kultural terbuka dari perspektif filsafat dan budaya sastra. Ruang kultural terbuka merupakan gambaran oleh Rorty atas corak jaman yang diwarnai oleh semangat humanisme dan dihargainya peran imajinasi. Perubahan personal, sosial, dan budaya pada kurun jaman ini terjadi melalui bahasa atau disebut sebagai nominalisme. Ruang kultural terbuka merupakan sekularisasi yang matang yang disebabkan oleh penerimaan atas temporalitas dan kontingensi keyakinan dan keinginan manusia. Dinamika yang terjadi dalam ruang kultural terbuka itu mengedepankan pluralitas, menghargai imajinasi, mendayagunakan metafora dan narasi sebagai katalisator perluasan, dan dituntun oleh utopia. Di dalam ruang kultural terbuka itu dilangsungkan proses-proses rekontekstualisasi, rekonsiliasi, dan komunikasi apreasiatif.

Bab IV Pedagogi Keberagaman: Rekontekstualisasi, Rekonsiliasi, Apresiasi berisi rumusan terstruktur tiga proses pedagogi keberagaman, yakni rekontekstualisasi, rekonsiliasi, dan apresiasi. Dalam bab ini juga dijelaskan bahwa dinamika inti dari pedagogi keberagaman adalah interaksi rekonsiliatif individu, kelompok, dan institusi dalam mewujudkan tujuan bersama (*we-intentions*), yakni kesejahteraan umum. Interaksi yang rekonsiliatif mengandaikan pengembangan kemampuan interkulturasi dan komunikasi apresiatif pada subjek, sistem yang ramah (apropriatif) terhadap pluralitas kosakata, dan struktur yang pragmatis untuk pencapaian tujuan bersama. Harus dikatakan di sini bahwa pendidikan rekontekstualisasi, pembelajaran rekonsiliatif, dan aktivitas konversasional yang direncanakan dalam pedagogi keberagaman ini hanya memadai untuk membantu subjek memperoleh kemampuan untuk melakukan politik kebudayaan, interkulturasi, dan komunikasi apresiatif. Ketiga strategi tersebut secara teoretis sangat terbatas pada pengembangan ranah privat dan kurang relevan untuk penciptaan sistem dan struktur publik. Penciptaan sistem dan struktur publik mengandaikan kekuasaan dan legitimasi politik. Namun, tetap bisa diharapkan bahwa transformasi pada subjek karena pengelolaan aneka perjumpaan dalam pendidikan berpedagogi keberagaman akan memberi dampak pada berfungsinya individu secara sosial dan interkulturatif dalam sistem dan struktur di lingkungannya masing-masing.

Bab V Sumbangan Konsep Pedagogi Keberagaman bagi Pengembangan Pendidikan di Indonesia berisi ulasan konteks sosio-historis diskursus keberagaman pada masyarakat Indonesia. Konteks yang perlu ditimbang dalam upaya implementasi pedagogi keberagaman dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia meliputi pendekatan-pendekatan multikultural yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan fenomena rekonsiliasi interkultural dalam tradisi keagamaan dan tradisi literasi pada masyarakat Indonesia.

Selanjutnya dibahas dalam bab ini bahwa konsep-konsep dalam pedagogi keberagaman berperan memberikan penjelasan, memberi wawasan, dan menawarkan strategi pembelajaran atas konsep proses dan kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia. Antara lain dijelaskan pada bab ini istilah literasi, akulturasi, dan interaksi. Sebagai penutup bab, dibicarakan mengenai sumbangan

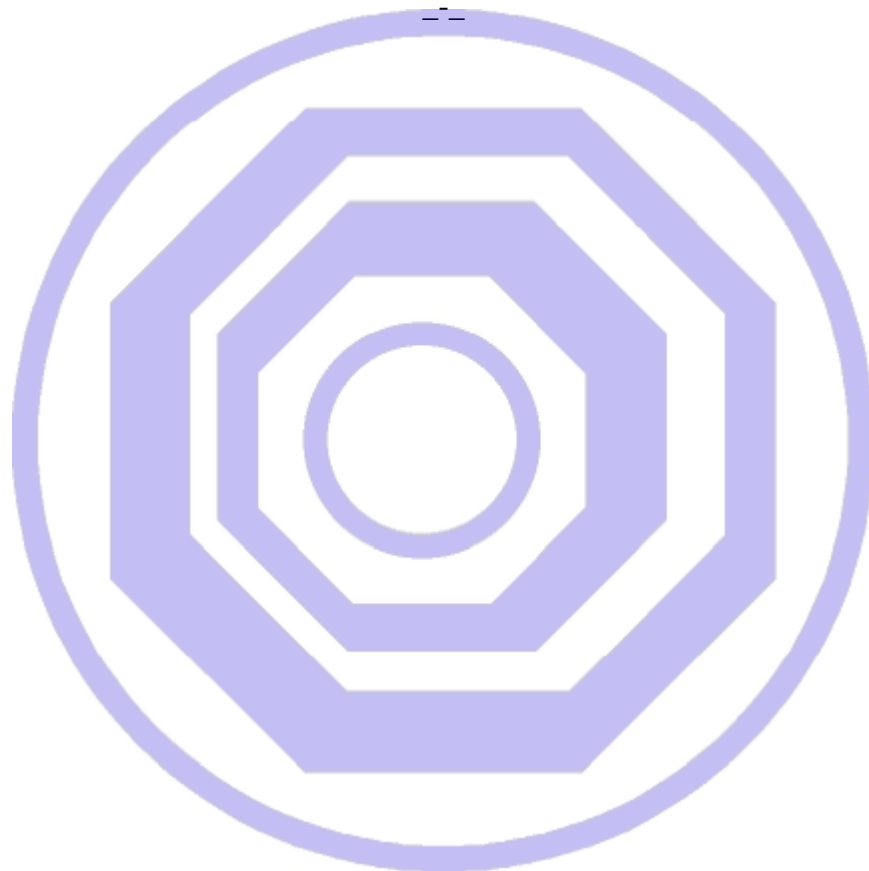
pedagogi keberagaman dalam pengembangan pendidikan yang memfasilitasi rekonsiliasi interkultural dan pemikiran bersama mengenai kesejahteraan masyarakat di Indonesia, misalnya penciptaan sistem dan struktur yang bisa memfasilitasi konektivitas dan distribusi.

Bab VI Kesimpulan berisi rangkuman pokok-pokok mengenai filsafat-sebagai-percakapan sebagai pluralisme estetis, pokok-pokok mengenai ruang kultural terbuka, pokok-pokok pedagogi keberagaman, serta pokok-pokok mengenai pedagogi keberagaman dalam konteks pendidikan di Indonesia, kesimpulan, catatan kritis dan saran.

1.8 Rangkuman

Disertasi ini merupakan upaya perumusan pedagogi keberagaman dengan memakai filsafat-sebagai-percakapan sebagai titik tolak. Pada bab ini, disampaikan latar belakang pemikiran bahwa gagasan Rorty mengenai filsafat-sebagai-percakapan dipakai sebagai titik tolak pragmatis perumusan pedagogi keberagaman tersebut. Filsafat-sebagai-percakapan memang tidak dimaksudkan oleh Rorty menjadi pemikiran untuk pengembangan pendidikan ataupun untuk pengembangan diskursus mengenai keberagaman. Namun demikian, gagasan-gagasan dalam filsafat-sebagai-percakapan menjanjikan untuk dikaji sebagai titik tolak yang kaya dan mencukupi untuk pengembangan pemikiran mengenai pendidikan dan pengembangan kualitas hidup berbasis keberagaman. Kekayaannya terletak pada prinsip keterbukaan, yang dibangun dengan memakai konsep kontingensi dan pluralitas dari pragmatisme, historisisme, dan nominalisme. Kecukupannya terlihat dalam fleksibilitasnya untuk dirumuskan sebagai capaian, proses, dan strategi pedagogi keberagaman. Penyelenggaraan pembelajaran dan pembelajaran dengan strategi rekontekstualisasi, rekonsiliasi, dan komunikasi apresiasitif dikembangkan dari gagasan-gagasan mengenai redeskripsi dan transformasi dalam filsafat-sebagai-percakapan sebagai dinamika kebudayaan dan interaksi antarpribadi beragam.

Berdasarkan sedikit kajian pada bab ini atas filsafat-sebagai-percakapan dan kemungkinan-kemungkinan untuk mengembangkannya dalam pendidikan, dirumuskan satu permasalahan utama yang dijabarkan dalam tiga anak pertanyaan. Ringkasan atas jawaban terhadap permasalahan tersebut dirumuskan pada bab ini sebagai tesis hasil penelitian. Bab-bab yang menyusul akan merupakan pendalaman atas tesis tersebut.



Daftar Pustaka

- Acciaoli, G. "Culture as Art: From Practice to Spectacle in Indonesia." *Canberra Anthropology* 8(1-2) (1985): 148-72.
- Adams, K. M. *Art as Politics: Re-Crafting Identities, Tourism, and Power in Tana Toraja, Indonesia*. University of Hawai'i Press, 2006.
- Aine, M. *The Ironist and the Romantic: Reading Richard Rorty and Stanley Cavell*. London & New York: Bloomsbury Academic, Bloomsbury Publishing Plc., 2014.
- Allison, D. "Believing in Literature." Dalam D. Allison, *Skin: Talking about Sex, Class, and Literature*. Ithaca, NY: Firebrand Books, 1994.
- Allmendinger, J., & S. Leibfried. "Education and the Welfare State: The Four Worlds of Competence Production." *Journal of European Social Policy* 13(1) (2003): 63-81.
- Aragon, L. V. "Barkcloth in Central Sulawesi: A Vanishing Technology in Outer Island, Indonesia." *Expedition* 32(1) (1990): 33-48.
- Arcilla, R. V. "Edification, Conversation, and Narrative: Rortyan Motifs for Philosophy of Education." *Educational Theory* 40(1) (1990): 35-9.
- Audi, R. (Ed.). "Pluralism." Dalam R. Audi, *The Cambridge Dictionary of Philosophy* (Edisi kedua, 714-745). Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999.
- Badan Pusat Statistik. "Badan Pusat Statistik, 2022: Angka Melek Huruf." <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>.
- "Badan Pusat Statistik, 2022: Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi menurut Badan Pusat Statistik." <https://www.bps.go.id/indicator/28/1446/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-jenis-kelamin.html>.
- "Badan Pusat Statistik, 2022: Data Pendidikan." <https://www.bps.go.id/statictable/2010/03/19/1525/indikator-pendidikan-1994-2022.html>.
- "Badan Pusat Statistik, 2022: Literacy Rate by Country." <https://wisevoter.com/country-rankings/literacy-rate-by-country/>.
- "Badan Pusat Statistik, 2022: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia." (n.d.). <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>
- Baier, A. *A Progress of Sentiments: Reflections on Hume's Treatise*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991.
- Bakhtin, M. M. *Art and Answerability*. Ed. M. Holquist & V. Liapunov. Penerj. V. Liapunov & K. Brostrom. Austin: University of Texas Press, 1990. (Ditulis 1919–1924, dipublikasikan 1974-1979).
- *Toward a Philosophy of the Act*. Ed. V. Liapunov & M. Holquist. Penerj. V. Liapunov. Austin: University of Texas Press, 1993.
- Barber, B. *Consumed: How Markets Corrupt Children, Infantilize Adults, and Shallow Citizen Whole*. New York, NY: W.W. Norton, 2007.

- Barker, C. *Kamus Kajian Budaya*. Penerj. B. Hendar Putranto. Yogyakarta: PT Kanisius, 2003.
- Barthes, R. "The Death of the Author." Dalam *The Rustle of Language*, 49-55. Penerj. R. Howard. New York: Hill and Wang, 1968.
- . *Camera Lucida*. Penerj. R. Howard, dari *La Chambre Claire*. New York: Hill and Wang, 1981.
- . *The Rustle of Language*. Penerj. R. Howard. New York: Hill and Wang, 1986.
- Bernstein, R. "Philosophy in the Conversation of Mankind." *The Review of Metaphysics* 33(4) (1980): 745-75. Diakses dari <http://www.jstor.com/stable/20127425>
- . *Beyond Objectivism and Relativism*. Philadelphia: The University of Pennsylvania Press, 1983.
- Bhaskar, R. *Philosophy and the Idea of Freedom*. Oxford, UK & Cambridge, USA: Blackwell, 1991.
- Bloom, H. *The Western Canon: The Books and School of the Ages*. New York: Harcourt Brace, 1994.
- . *How to Read and Why*. New York: Scribner, 2000.
- Bourdieu, P. "Genesis and Structure of the Religious Field." *Comparative Social Research* 13 (1991): 1-44.
- Brandom, R. (Ed.). *Rorty and His Critics*. NJ, USA: Wiley-Blackwell, 2000.
- Brown, M. (Ed.). *The Cambridge History of Literary Criticism: Vol. 5: Romanticism* (9 Volume) [versi daring]. Cambridge University Press, 2008.
- Castoriadis, C. "The End of Philosophy." *Salmagundi* 82/83 (1989): 3-23.
- Cavell, S. *The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy*. New York: Oxford University Press, 1979.
- Conant, J. "Freedom, Cruelty, and Truth: Rorty versus Orwell." Dalam R. Brandom (Ed.), *Rorty and His Critics*. NJ, USA: Wiley-Blackwell, 2000.
- Cooperrider, D. L. *Appreciative Inquiry: A Methodology for Understanding and Enhancing Organizational Innovation* [Disertasi PhD]. Case Western Reserve University, 1986.
- Cooperrider, D. L., & D. Whitney. *Appreciative Inquiry*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2005.
- Cooperrider, D. L., & D. Whitney. "A Positive Revolution in Change." Dalam D. L. Cooperrider, P. Sorensen, D. Whitney, & T. Yeager (Eds.), *Appreciative Inquiry: An Emerging Direction for Organization Development*. Champaign, IL: Stipes, 2005.
- Critchley, S., J. Derrida, E. Laclau, & R. Rorty. *Deconstruction and Pragmatism*. Ed. Chantal Mouffe. London & New York: Routledge, 1996.
- Culler, J. *Framing the Sign: Criticism and Its Institutions*. Oklahoma: Univ of Oklahoma Pr., 1989.
- Davidson, D. "Paradoxes of Irrationality." Dalam R. Wollheim & J. Hopkins (Eds.), *Philosophical Essays on Freud*. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

- . "What Metaphors Mean." Dalam D. Davidson, *Inquiries into Truth and Interpretation*. New York: Oxford University Press, 1984.
- Dewey, J. *Art as Experience*. New York: Capricorn Books, 1958.
- . "Experience and Nature." Dalam J. A. Boydston (Ed.), *John Dewey: The Later Works, 1925-1953* (Vol. 1). Carbondale and Edwardsville, III.: Southern Illinois University, 1981.
- . *Human Nature and Conduct* (1922). Amherst, NY: Prometheus Books, 2002.
- Dewey, J., & A. F. Bentley. "Knowing and the Known." Dalam J. A. Boydston (Ed.), *John Dewey: The Later Works, 1925-1953* (Vol. 16). Carbondale and Edwardsville, III.: Southern Illinois University, 1981.
- Drong, L. "A Few Skeptical Marks on Richard Rorty's Philosophy of Education: Or, Do we really want Ironist Liberal Zarathustras on Our Campuses?" Dalam M. G. Perry & W. Lalicker (Eds.), *Perspectives in Higher Education: Poland Proceedings*, 65-77. West Chester: West Chester University Press, 2007.
- . *Disciplining the New Pragmatism: Theory, Rhetoric, and the Ends of Literary Study*. (Vol. 26 dari *Literary and Cultural Theory*). Frankfurt Am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2007.
- Edelman. "Edelman Trust Barometer Global Report 2018 dan 2019." <https://www.edelman.com>.
- . "Edelman Trust Barometer Global Report 2019 dan 2020." <https://www.edelman.com>.
- Ellsworth, E. *Teaching Positions: Difference, Pedagogy and the Power of Address*. Columbia: Teachers College Press, 1997.
- Eliot, G. *Middlemarch* (1872). New York: Signet Classics, 2003.
- Emerson, R. W. *Essays and Lectures*. New York: Library of America, 1983.
- Fawcett, L. *Religion, Ethnicity and Social Change*. London & Hampshire, RG21 6XS: Macmillan Press Ltd., 2000.
- Figuerola Muñoz, M. "Ethnocentrismo Crítico y Solidariedad." *Erasmus* XVIII(1) (2016): 73-92.
- Fish, S. E. *The Trouble with Principle*. USA: President and Fellow of Harvard College, 1999.
- Florida, R. *The Rise of the Creative Class. Revisited. Edisi Ulang Tahun ke-10*. New York: Basic Books, 2012.
- Formichi, C. (Ed.). *Religious Pluralism in Indonesia: Threats and Opportunities for Democracy*. Ithaca, NY: Cornell University Press, Southeast Asia Program Publications at Cornell University, 2021. <https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv1hw3wr9>
- Fraser, N. "Solidarity or Singularity? Richard Rorty Between Romanticism and Technocracy." Dalam A. Malachowski (Ed.), *Reading Rorty: Critical Responses to Philosophy and the Mirror of Nature (and Beyond)*. Cambridge, Massachusetts: Basil Blackwell, 1990.

- Freire, P. *Pedagogy of the Oppressed*. Penerj. M. B. Ramos. New York: The Continuum International Publishing Group Inc., 2005.
- Gadamer, H. G. *Truth and Method*. Edisi Kedua. Penerj. J. Weinsheimer & D. G. Marshall. New York: The Continuum Publishing Company, 1998. (Edisi asli diterbitkan tahun 1986).
- Garrison, J. W. & Anthony G. Rud (Eds.). *Educational Conversation: Closing the Gap*. Albany: State University of New York Press, 1995.
- Geertz, C. *Islam Observed: Religious Development in Marocco and Indonesia*. Chicago: University of Chicago Press, 1968.
- Ghilardelli Jr., P. *Richard Rorty: A Filosofia do Novo Mundo em Busca de Mundos Novos*. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 1999.
- Giddens, A. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge, UK: Polity Press, 1984.
- Giroux, H. A. *Teachers as Intellectuals: Towards a Critical Pedagogy of Learning*. Westport, CT: Bergin & Garvey, 1988.
- Godzich, W. *The Culture of Literacy*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994.
- Goodman, R. B. "Rorty and Romanticism." Dalam E. Minar & S. Levine (Eds.), *Philosophical Topics: Pragmatism* (36) (2008): 79–95.
- Greenstone, M., et al. "Thirteen Economic Facts about Social Mobility and the Role of Education." *Policy Memo* (Juni 2013). Washington: The Hamilton Project.
- Hall, D. L. *Richard Rorty: Prophet and Poet of the New Pragmatism*. Albany, NY: State University of New York Press, 1994.
- Hammer, E. "Contingency, Disenchantment, and Nihilism: Rorty's Vision of Culture." Dalam M. Buschmeier & E. Hammer (Eds.), *Pragmatismus und Hermeneutik: Beiträge zu Richard Rortys Kulturpolitik*, 126–37. Hamburg: Felix Meiner, 2011.
- Harmon, W. *Classic Writings on Poetry*. New York, NY: Columbia University Press, 2005.
- Hegel, G.W.F. *Hegel: The Letters*. Bloomington: Indiana University Press, 1984.
- Herry-Priyono, B. *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Huntington, S. P. "The Clash of Civilizations?" *Foreign Affairs* 72(3) (1993): 22–49. <https://doi.org/10.2307/20045621>
- James, W. "Does 'Consciousness' Exist?" Dalam F. Burkhardt (Ed.), *Essays in Radical Empiricism. The Works of William James*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976.
- "The Sentiment of Rationality." Dalam F. Burkhardt (Ed.), *Essays in Radical Empiricism. The Works of William James*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976.
- Janik, A. "On Edification and Cultural Conversation: A Critique of Rorty." *Boston Studies in the Philosophy of Science*, vol 114 (1989). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-009-2251-8_4

- Jordan, J. O. (Penyunting). *The Cambridge Companion to Charles Dickens*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Junus, M. *Sedjarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1960.
- Kersten, C. "A History of Islam in Indonesia: Unity in Diversity." Dalam C. Hillenbrand (Editor Seri), *The New Edinburgh Islamic Surveys*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd., 2017.
- Ki Hadjar Dewantara. *Karya Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama, Pendidikan*. Cetakan Ketiga, 2004. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1961a.
- . *Karya Ki Hadjar Dewantara: Bagian Kedua, Kebudayaan* (Cetakan Kedua, 1994). Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1961b.
- Kipp, R. S. *Dissociated Identities: Ethnicity, Religion and Class in an Indonesian Society*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993.
- Knobe, J. "A Talent for Bricolage: An Interview with Richard Rorty." *The Dualist* 2 (1995): 56-71.
- Koopman, C. "Rorty's Metaphilosophy: A Pluralistic Corridor." Dalam *The Cambridge Companion to Rorty*, 19-41). <https://doi.org/10.1017/9781108678261.002> (diunduh 2021).
- Kundera, M. *The Art of the Novel*. Terj. Linda Asher. New York, NY: Harper Perennial, 1988.
- Kwak, D.-J. "Stanley Cavell's Moral Perfectionist as the Post-modern Ideal of the Educated Person: An Alternative to Richard Rorty's Liberal Ironist." 2002. http://s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/70621/1/vol12_2.pdf
- Laffan, M. *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma below the Winds*. New York: RoutledgeCurzon, 2003.
- . *The Making of Indonesian Islam: Orientalism and the Narration of a Sufi Past*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011.
- Latif, Y. *Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Laurillard, D. *Rethinking University Teaching: A Conversational Framework for the Effective Use of Learning Technologies*. Edisi Kedua. London & New York: RoutledgeFalmer, 2002.
- Leib, E. J. "Rorty's New School of American Pride: The Constellation of Contestation and Consensus." *Polity* 36(2) (2004): 193-212. <http://www.jstor.com/stable/3235478>
- Lesser, W. (Ed.). *The Genius of Language: Fifteen Writers Reflects on Their Mother Tongue*. New York: Anchor Books, 2004.
- Levi, I. "Escape from Boredom: Edification According to Rorty." *Canadian Journal of Philosophy* 11(4) (1981): 589-601. <http://www.jstor.org/stable/40231219> (diunduh 24 Juli 2021).
- Llanera, T. "Redeeming Rorty's Private-Public Distinction." *Contemporary Pragmatism* 13(3) (2016): 319-40. <https://doi.org/10.1163/18758185-01303005>

- Lombard, D. *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Vol. 1 & 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Lussier, D. N., & M.S. Fish. "Indonesia: The Benefits of Civic Engagement." *Journal of Democracy* 23(1) (2012): 70–84. <https://doi.org/10.1353/jod.2012.0017>
- Lyotard, J.-F. *Postmodern Fables*. Penerj. G. V. D. Abbeele. Minnesota: University of Minnesota Press, 1999.
- Magnis-Suseno, F. *Etika Abad Kedua Puluh*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.
- Malachowski, A. "Rorty against the Ontologists." Dalam S. C. Wheeler III (Ed.), *Richard Rorty's Multiple Legacies*, 187-196. *The European Legacy* 19, 2014.
- Malachowski, A. (Ed.), & J. Burrows (Ass. Ed.). *Reading Rorty: Critical Responses to Philosophy and the Mirror of Nature (and Beyond)*. Oxford, UK: Basil Blackwell Ltd., 1990.
- McVey, R. T. *The Rise of Indonesian Communism*. Ithaca: Cornell University Press, 1965.
- Mead, G. H. *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*. Editor C. W. Morris. Chicago: The University of Chicago Press, 1934.
- Messer, D. J. *The Development of Communication: From Social Interaction to Language*. Chichester: John Wiley, 1994.
- Michelman, F. "How Can the People Ever Make the Laws? A Critique of Deliberative Democracy." Dalam J. Bohman & W. Rehg (Eds.), *Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics*. Cambridge, MA: MIT Press, 1997.
- Miller, S. *Conversation: A History of a Declining Art*. New York: Yale University Press, 2006.
- Morgan, G. "Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving in Organization Theory." *Administrative Science Quarterly* 24 (1980): 605-22.
- Morrison, T. *Beloved*. New York: Alfred A. Knopf, 1987.
- Mrázek, R. *Sjahir: Politics and Exile in Indonesia*. Itacha: Cornell University (SEAP), 1994.
- Naím, M. *The Revenge of Power: How Autocrats are Reinventing Politics for the 21st Century*. New York: St. Martin's Press, 2022.
- News Desk. "Indonesia Ranks Second-last in Reading Interest." *The Jakarta Post*, 29 Agustus 2016, News Desk. <https://www.thejakartapost.com/life/2016/08/29/indonesia-ranks-second-last-in-reading-interest-study.html>
- Nicholson, C. "Postmodernism, Feminism, and Education: The Need for Solidarity." *Educational Theory* 39(3) (1989): 197-205.
- Noaparast, K. B. "Richard Rorty's Conception of Education of Philosophy of Education Revisited." *Educational Theory* 64(1) (2014): 75-98. University of Illinois.
- Nyíró, M. "Rorty on Politics, Culture, and Philosophy: A Defence of His Romanticism." *Human Affairs* 19 (2009): 60-7. <https://doi.org/10.2478/v10023-009-0021-0>
- O'Malley, J. W. *Four Cultures of the West*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004.

- Oakeshott, M. *Rationalism in Politics and Other Essays*. London: Methuen & Co. Ltd, 1962.
- Oatley, K. "Worlds of the Possible: Abstraction, Imagination, Consciousness." *Pragmatics & Cognition* 21(2013): 448-68. <http://dx.doi.org/10.1075/pc.21.3.02oat>
- Oliverio, S. "An Edifying Philosophy of Education? Starting a Conversation between Rorty and Post-critical Pedagogy." *Ethics and Education* 14(4) (2019): 482-96. <https://doi.org/10.1080/17449642.2019.1669311>
- Olson, G. A. "Social Construction and Compositional Theory." *Journal of Advanced Composition* 54 (1989): 1-9.
- Parekh, B. "Nasional Culture and Multiculturalism." Dalam K. Thompson (Ed.), *Media and Culture Regulation*, 183-4. London: Sage, 1997.
- Pask, G. *Conversation Theory: Applications in Education and Epistemology*. Amsterdam and New York: Elsevier, 1976.
- Peters, M. "Wittgenstein and Post-analytic Philosophy of Education: Rorty or Lyotard?" *Educational Philosophy and Theory* 29 (2) (2007): 1-32. <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.1997.tb00018.x>
- Pinar, W. *The Character of Curriculum Studies: Bildung, Curerre, and the Recurring Question of the Subject*. USA: Palgrave Macmillan, 2011.
- Pincus, F. L. "Diversity." Dalam W. A. Darity, Jr. (Ed.), *International Encyclopaedia of the Social Sciences* (Vol. 2, 419-20). Detroit: Macmillan Reference USA, 2008.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Baoesastra Djawa*. Groningen, Batavia: J.B. Wolters' Uitgevers Maatschappij n.v., 1939.
- Popper, K. *The Poverty of Historicism*. London: Routledge and Kegan Paul, 1957.
- Ragg, E. P., & Richard Rorty. "Worlds or Words Apart? The Consequences of Pragmatism for Literary Studies: An interview with Richard Rorty." *Philosophy and Literature* 26(2) (2002): 369-96. <https://doi.org/10.1353/phl.2003.0015>
- Ramage, D. E. *Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. London & New York: Routledge, 1995.
- Ramberg, B. T. "For the Sake of His Own Generation: Rorty on Destruction and Edification." Dalam A. Gröschner, C. Koopman, & M. Sandbothe (Eds.), *Richard Rorty. From Pragmatist Philosophy to Cultural Politics*. London: Bloomsbury, 2013.
- , "Irony's Commitment: Rorty's Contingency, Irony and Solidarity." Dalam S. C. Wheeler III (Ed.), *Richard Rorty's Multiple Legacies*, 144-62. The European Legacy 19, 2014.
- Reich, R. *The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism*. New York: Vintage Books, A Division of Random House Inc., 1992.
- , "The Paradoxes of Education in Rorty's Liberal Utopia." Dalam F. Margonis (Ed.), *Philosophy of Education*, 342-51). Urbana, IL: Philosophy of Education Society, 1996.

- Renner, K. "The Development of Capitalist Property and the Legal Institutions Complementary to the Property Norm." Dalam Wilhelm Aubert (Ed.), *Sociology of Law*. Baltimore, Maryland: Penguin Books, 1969.
- Ricoeur, P. "Appropriation." Dalam J. Thompson (Ed.), *Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation* (Cambridge Philosophy Classics), 144-56. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316534984.010>
- Rodin, J. *Public Discourse in America: Conversation and Communication in the Twenty-first Century*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2003.
- Rohrer, P. "Self-Creation or Choosing the Self: A Critique of Richard Rorty's Idea of Democratic Education." *Philosophy of Education* (2000): 55-62.
- Rorty, R. "Recent Metaphilosophy." *Review of Metaphysics* 15 (1961): 299-318.
- . *The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method*. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1967.
- . "Overcoming the Tradition: Heidegger and Dewey." *Review of Metaphysics* 30(2) (1976): 319-23.
- . "Professionalized Philosophy and Transcendentalist Culture" [PPTC]. *The Georgia Review* 30(4) (1976): 757-69.
- . "Derrida on Language, Being, and Abnormal Philosophy." *The Journal of Philosophy* 74(11) (1977): 675-6.
- . "Philosophy as a Kind of Writing: An essay on Derrida" [PKW]. *New Literary History* 10(1) (1978): 141-60.
- . *Philosophy and the Mirror of Nature* [PMN]. New Jersey: Princeton University Press, 1979.
- . "Pragmatism, Relativism, and Irrationalism" [PRI]. *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association* 53(6) (1980): 719-38. <https://doi.org/10.2307/3131427>
- . "Nineteenth-Century Idealism and Twentieth-Century Textualism" (NITT). *The Monist* 64(2) (1981): 155-74.
- . *Consequences of Pragmatism: (Essays: 1972-1980)* [CP]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982.
- . "Keeping Philosophy Pure: An Essay on Wittgenstein." Dalam R. Rorty, *Consequences of Pragmatism: (Essays: 1972-1980)* [CP], 19-36. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982.
- . "Hermeneutics, General Studies, and Teaching." Dalam *Selected Papers from the Synergos Seminars* Volume 2 (1982b): 112.
- . "Deconstruction and Circumvention." *Critical Inquiry* 11(1) (1984): 1-23. <http://www.jstor.org/stable/1343288>
- . "Philosophy without Principles." *Critical Inquiry* 11(3) (1985): 459-65.
- . "Solidarity or Objectivity?" Dalam J. Rajchman & C. West (Eds.), *Post-Analytic Philosophy*. New York: Columbia University Press, 1985.
- . "Texts and Lumps." *New Literary History* 17(1) (1985): 1-16.

- . “Comments on Castoriadis's 'The End of Philosophy'” [TEP]. *Salmagundi* 82/83 (1989): 24-30.
- . *Contingency, Irony, and Solidarity* [CIS]. Cambridge: Cambridge University Press 1989.
- . “Private Irony and Liberal Hope.” Dalam R. Rorty, *Contingency, Irony, and Solidarity* [CIS], 73-95. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- . “Truth and Freedom: A Reply to Thomas McCarthy” [TF]. *Critical Inquiry* 16(3) (1990): 633-43.
- . “The Dangers of Over-Philosophication — Reply to Arcilla and Nicholson.” *Educational Theory* 40(1) (1990): 41-4.
- . *Essays on Heidegger and Others* [EHO]. Philosophical Papers 2. Cambridge University Press, 1991.
- . “Freud and Moral Reflection” [FMR]. Dalam R. Rorty, *Essays on Heidegger and Others* [EHO], 143-163. Philosophical Papers 2. Cambridge University Press, 1991. (Karya asli diterbitkan pada tahun 1991)
- . “Heidegger, Kundera, and Dickens” [HKD]. Dalam R. Rorty, *Essays on Heidegger and Others* [EHO], 66–82. Philosophical Papers 2. Cambridge University Press, 1991. (Karya asli diterbitkan pada tahun 1991)
- . *Objectivity, Relativism, and Truth* [ORT]. Philosophical Papers 1. New York: Cambridge University Press, 1991.
- . “On Ethnocentrism: A reply to Clifford Geertz.” Dalam R. Rorty, *Objectivity, Relativism, and Truth* [ORT], 203–10. Philosophical Papers 1. Cambridge University Press, 1991. (Karya asli diterbitkan pada tahun 1991)
- . “The Priority of Democracy to Philosophy” [PDP]. Dalam R. Rorty, *Objectivity, Relativism, and Truth* [ORT], 175-96. Philosophical Papers 1. Cambridge University Press 1991. (Karya asli diterbitkan pada tahun 1991)
- . “The Pragmatist's Progress” [TPP]. Dalam S. Collini (Ed.), *Interpretation and Overinterpretation*, 89-108. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- . “Trotsky and the Wild Orchids” [TWO]. Dalam R. Rorty, *Philosophy and Social Hope* [PSH], 1998: 3-20. New York: Penguin Books, 1992.
- . “The Unpatriotic Academy” [UA]. *New York Times*, 13 Februari 1994, Bagian 4, 15.
- . “Truth, Politics and ‘Post-Modernism’.” *Amsterdam: Uitgeverij Van Gorcum*. 1997.
- . *Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth Century America* [AOC]. Cambridge: Harvard University Press, 1998.
- . “The Inspirational Value of Great Works of Literature” [IV]. Dalam R. Rorty, *Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth-Century America* [AOC], 125-40. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998.
- . *Truth and Progress* [TP]. Philosophical Papers 3. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

- . "Education as Socialization and Individualization" [ESI]. Dalam *Philosophy and Social Hope* [PSH], 114-26). New York: Penguin Books, 1999.
- . *Philosophy and Social Hope* [PSH]. New York: Penguin Books, 1999.
- . "Philosophy as a Transitional Genre" [PTG]. Dalam R. J. Bernstein, S. Benhabib, & N. Fraser (Eds.), *Pragmatism, Critique, Judgment: Essays for Richard J. Bernstein*, 3-28. Cambridge, MA: MIT Press, 2004.
- . "Reconsideration of Rorty's View of the Liberal Ironist and its Implications for Postmodern Civic Education." *Educational Philosophy and Theory* 36(4) (2004). Oxford and Massachusetts: Blackwell Publishing.
- . "Intellectual Autobiography of Richard Rorty." Dalam Auxier, R., & Hahn, L. (Eds.), *The Philosophy of Richard Rorty* (The Library of Living Philosophers, 32), 3-24. Chicago and La Salle, Illinois: Open Court, 2007.
- . *Philosophy as Cultural Politics* [PCP]. Philosophical Papers 4. New York: Cambridge University Press, 2007.
- . "The Fire of Life." Dalam *Poetry*, November 2007.
- . *An Ethics for Today: Finding Common Ground between Philosophy and Religion* [ET]. New York: Columbia University Press, 2008.
- Richard, R., D. Nystrom & K. Puckett. "Against Bosses, Against Oligarchies: A Conversation with Richard Rorty." Chicago: Prickly Paradigm, 2002.
- Rorty, R., & G. Vattimo. *The Future of Religion* (Ed. S. Zabala). New York: Columbia University Press, 2005.
- Rosen, S. *Hermeneutics as Politics*. New York: Oxford University Press, 1987.
- Royce, J. *The Philosophy of Loyalty*. New York: Macmillan, 1908.
- . *The Hope of the Great Community*. New York: Macmillan, 1916.
- Santayana, G. "The Need for a Recovery Philosophy." Dalam *Winds of Doctrine*. New York: Charles Scribner's Sons, 1913.
- . "Tradition and Practice." Dicitak kembali dalam R. C. Lyon (Ed.), *Santayana on America*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1968.
- Santoso, S. *Sutasoma, a Study in Old Javanese Wajrayana*. New Delhi: International Academy of Culture, 1975.
- Saussure, F. de. *Course in General Linguistics*. Penerj. C. Bally & A. Sechehaye, Editor W. Baskin. London: G. Duckworth, 1916.
- Schulenberg, U. "From Redescription to Writing: Rorty, Barthes, and the Idea of a Literary Culture." *New Literary History* 38(2) (2007): 371-87. <https://doi.org/10.1353/nlh.2007.0034>
- . *Romanticism and Pragmatism: Richard Rorty and the Idea of a Poeticized Culture*. London: Palgrave MacMillan, 2015.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Pembukaan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia." Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945.
- . "Kerangka Acuan Pendidikan Karakter." Jakarta: Kemendiknas; Direktorat Ketenagaan; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.

- . Pasal 6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Sekretariat Negara, 2011.
- . Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Jakarta: Sekretariat Negara, 2016.
- . Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Jakarta: Sekretariat Negara, 2017.
- . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Negara, 2020.
- Sen, A. *Inequality Re-examined*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 1992.
- . *Development of Freedom*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 1999.
- . *The Idea of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009.
- Shihab, A. *Islam Sufistik: "Islam Pertama" dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2001.
- Shklar, J. *Ordinary Vices*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984.
- Shook, J. R. "Pragmatism, Pluralism, and Public Democracy." *Revue Française d'Études Américaines*, 2(124) (2010): 11-28.
- Simon, R. I. *Teaching against the Grain: Text for a Pedagogy of Possibility*. NY: Bergin & Garvey, 1992.
- Simpson, A. "Reconfiguring Intercultural Communication Education through the Dialogical Relationship of Istina (Truth) and Pravda (Truth in Justice)." *Educational Philosophy and Theory* (2022). <https://doi.org/10.1080/00131857.2022.2098109>
- Smith, A. D. *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford: Blackwell, 1986.
- . *Nations and Nationalism in a Global Era*. Cambridge: Polity Press, 1995.
- Smith, P., & A. Riley. *Cultural Theory: An Introduction* (Edisi Kedua). Massachusetts-USA: Wiley-Blackwell, 2008.
- Snow, C. P., & S. Collini. *The Two Cultures* (1959). Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Soekarno, I. "Tahun Tantangan (A Year of Challenge)" (Amanat Presiden Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1958 di Jakarta). Dalam Soekarno, 1965, *Di Bawah Bendera Revolusi* (Jilid II). Panitia Penerbit, 1958.
- Sosa, A. "Jesuit Education: Forming Human Beings in Harmony with their Fellows, with Creation and with God." Naskah Pidato dalam International Congress for Jesuit Education Delegates-Jesedu-Rio2017 di Rio de Janeiro, Brazil, 20 Oktober, 2017a.
- . "On Discernment in Common." Surat bernomor 2017/11. Roma: Society of Jesus, 2017b.
- . *Walking with Ignatius*. Percakapan dengan Darío Menor, Prologue oleh Jolanta Kafka, Indian Edition. Gujarat: Gujarat Sahitya Prakash, 2021.

- Sperber, D., & D. Wilson. *Relevance: Communication and Cognition*. NJ, USA: Wiley-Blackwell, 1995.
- Stavros, J., & C. Torres. *Conversations Worth Having: Using Appreciative Inquiry to Fuel Productive and Meaningful Engagement*. California: Berrett-Koehler Publishers Inc., 2018.
- Stiglitz, J. E. "The age of Donald Trump." *Mint*, 30 Desember 2016. <https://www.livemint.com/Opinion/mssPFfoIzskf8gQCuRrSIO/Joseph-Stiglitz--The-age-of-Donald-Trump.html>
- Striano, M. "Notes from the Playground: The Educational Process between Contingency and Luck." *European Journal of Pragmatism and American Philosophy*, XII-1/2020 Rethinking Rorty's Pragmatism. <http://journals.openedition.org/ejppap/1902>
- Stuhr, J. J. "Classical American Philosophy: Introduction." Dalam J. J. Stuhr (Ed.), *Pragmatism and Classical American Philosophy: Essential Readings & Interpretive Essays* (Edisi Kedua). New York: Oxford University Press, 2000.
- Sukiman. "Peran Museum sebagai Sumber Belajar dan Sarana Pendidikan Karakter Bangsa." <http://www.sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id> (diunduh 1 Mei 2021).
- Tartaglia, J. "Rorty's Thesis of the Cultural Specificity of Philosophy." *Philosophy East and West*, 64(4) (2014). Special Issue: Tenth East-West Philosophers' Conference, "Value and Values: Economics and Justice in An Age of Global Interdependence." Hawai: University of Hawai'i Press.
- Taub, S. F. *Language from the Body: Iconicity and Metaphor in American Sign Language*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Taylor, C. "The Politics of Recognition." Dalam A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism*. Princeton: Princeton University Press, 1994.
- . *Modern Social Imaginary*. Duke University Press: Public Planet Books, 2004.
- Toal, C. *The Entrapments of Form: Cruelty and Modern Literature*. New York: Fordham University Press, 2016.
- Toer, P. A., K.S. Toer, & E. Kamil. *Kronik Revolusi Indonesia*. Jilid V (1949). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Tréguer, P. "Meanings and Origin of the British Phrase '(dark) satanic mills'." <https://wordhistories.net/2019/09/12/dark-satanic-mills/>
- Ungureanu, C., & P. Monti. *Contemporary Political Philosophy and Religion: Between Public Reason and Pluralism*. New York: Routledge, 2018.
- Vasylchenko, A. "Postupok." Dalam B. Cassin, E. Apter, J. Lezra, & M. Wood (Eds.), *Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon*, 811–812. Princeton University Press, 2014a.
- . "Svoboda." Dalam B. Cassin, E. Apter, J. Lezra, & M. Wood (Eds.), *Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon*, 1105–1108. Princeton University Press, 2014b.
- . "Istina." Dalam B. Cassin, E. Apter, J. Lezra, & M. Wood (Eds.), *Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon*, 513–515. Princeton University Press, 2014c.

- Vattimo, G., & P. A. Rovatti (Eds.). "Dialectics, Difference and Weak Thought." Pernerj. T. Harrison. *Graduate Faculty Philosophy Journal*, vol. 10, no. 1; 1984 (1983): 151-164.
- Volkman, T. "Visions and Revisions: Toraja Culture and the Tourist Gaze." *American Ethnologist*, 17 (1990): 91–110.
- Voparil, C. "On the Idea of Philosophy as Bildungsroman: Rorty and his Critics." *Contemporary Pragmatism*, 2(1) (2005): 115–33. <https://doi.org/10.1163/18758185-900000005>
- . "The Politics of the Novel: Rorty on Democracy, Irony, and Moral Education." Dalam C. Voparil, *Richard Rorty: Politics and Vision*, 61-88. Rowman & Littlefield Publishers, 2006.
- . "Jonquils and Wild Orchids: James and Rorty on Politics and Aesthetic Experience." *The Journal of Speculative Philosophy*, 23(2) (2009): 100–10.
- . "Rorty and James on Irony, Moral Commitment, and the Ethics of Belief." *William James Studies*, 12(2) (2016): 1-27.
- Walker, M., & E. Unterhalter. "Amartya Sen's Capability Approach and Social Justice in Education." *Educational Action Research*, 15(4) (2007): 515-28. <https://doi.org/10.1080/09650790701602442>
- Watson, W. "Types of Pluralism." *Monist*, 73(3) (1990): 295-313.
- Whitney, D., & A. Trosten-Bloom. *The Power of Appreciative Inquiry: A Practical Guide to Positive Change*. Edisi Kedua. San Francisco: Barret-Koehler Publication Inc., 2002.
- Worthington, Jr., E. L. *Forgiveness and Reconciliation: Theory and Application*. Routledge, 2006.
- Woźnica, M. "Education as Edification: Richard Rorty's Neo-pragmatist Philosophy of Education." *Kwartalnik Pedagogiczny*, 64(2) (2019): 242-53.
- Yankelovich, D. *The Magic of Dialogue: Transforming Conflict into Cooperation*. New York, NY: Touchstone, 1999.
- Yoshida, H. *Iconicity in Language Learning: The Role of Mimetics in Word Learning Tasks* (Thesis Ph.D.). Indiana, Bloomington: Indiana University, 2003.
- Zoetmulder, P.J. *Manunggaling Kawula Gusti: Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa, Suatu Studi Filsafat*. Penerj. Dick Hartoko. Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1990.